

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I SOEKARNO-HATTA**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
www.kkpsoetta.com email:kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Tugas dan fungsi tersebut telah dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang penganggarannya dialokasikan dalam dokumen DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020. Laporan ini menyajikan pencapaian dari indikator keluaran berbagai kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki selama tahun 2020.

Kami harapkan laporan ini dapat memberikan informasi kepada unit utama kami Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, dan pihak-pihak terkait tentang capaian kinerja pada tahun 2020.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam pelaksanaan kegiatannya selama tahun 2020. Saran membangun kami harapkan, untuk mengatasi tantangan yang ditemukan demi peningkatan pencapaian kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun mendatang.

Tangerang, Januari 2021
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta



dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP. 196911252002121003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban kinerja KKP Kelas I Soekarno Hatta dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sebagai salah satu UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), maka orientasi kinerjanya adalah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Program P2P sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjabarkan capaian kinerja terhadap 7 indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana 7 indikator tersebut telah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 132,5% dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan tercapai sebanyak 16.072.033 dari target sebanyak 8.127.205, sehingga capaian kinerjanya 197,8%.
2. Indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu 100% dari target 90%, sehingga capaian kinerjanya 111,1%.
3. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara yaitu 112,3% dari target 85%, sehingga capaian kinerjanya 132,1%.
4. Indikator nilai kinerja anggaran yaitu 90,02 dari target 80, sehingga capaian kinerjanya 112,5%.
5. Indikator tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan yaitu 90% dari target 80%, sehingga capaian kinerjanya 112,5%.
6. Indikator nilai kinerja implementasi WBK satker yaitu 80,58 dari target 70 sehingga capaian kinerjanya 115,1%.
7. Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL yaitu 66% dari target 45% sehingga capaian kinerjanya 146,7%.

Untuk kinerja anggaran pada tahun 2020, realisasi anggaran yaitu Rp. 33.254.596.783 atau 92,46% dari total pagu anggaran Rp. 35.967.753.000,- .



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Manusia	6
F. Maksud dan Tujuan	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Perencanaan Kinerja	12
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Analisis Capaian Kinerja	17
1. Indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	17
2. Indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	33
3. Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara ...	42
4. Indikator nilai kinerja anggaran	58
5. Indikator tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	63
6. Indikator nilai kinerja implementasi WBK satker..	68
7. Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.	73
C. Realisasi Anggaran	78



BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Rencana Tindak Lanjut	88
LAMPIRAN	89
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Awal dan Revisi	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020	15
Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020.....	16
Tabel 3.2	Jumlah Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan Tahun 2020	22
Tabel 3.3	Faktor Risiko Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan yang Ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2020.....	34
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko Tahun 2020	45
Tabel 3.5	Pagu dan Realisasi Anggaran Pengeluaran Menurut Jenis Belanja KKP Kelas I Soekarno Hatta Tahun 2020.....	79
Tabel 3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020	79
Tabel 3.7	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020	80
Tabel 3.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020	81
Tabel 3.9	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020.....	83
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Indikator	84
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Output	86



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020	6
Grafik 1.2	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Lokasi Kerja Tahun 2020	7
Grafik 1.3	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Golongan Tahun 2020	7
Grafik 1.4	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020	8
Grafik 1.5	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Tahun 2020	8
Grafik 1.6	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2020.....	9
Grafik 1.7	Distribusi Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2020	9
Grafik 1.8	Distribusi Pegawai Honorer KKP Kelas I Soekarno-Hatta Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2020	10
Grafik 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator 1 Tahun 2020.....	23
Grafik 3.2	Perbandingan Jumlah Jumlah Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan Tahun 2018-2020.....	24
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 dengan Target RAK Tahun 2024	26
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020.....	27
Grafik 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator 2 Tahun 2020.....	35
Grafik 3.6	Perbandingan Jumlah Faktor Risiko yang Ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2018-2020	35
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 dengan Target RAK Tahun 2024	36
Grafik 3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan Renstra Kemenkes Tahun 2020.....	35
Grafik 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 KKP Kelas I Soekarno-	



	Hatta dan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020.....	37
Grafik 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator 2 Tahun 2020.....	45
Grafik 3.11	Perbandingan Jumlah Surveilans Rutin Tahun 2018 – 2020.....	46
Grafik 3.12	Perbandingan Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam Tahun 2018 – 2020	46
Grafik 3.13	Perbandingan Jumlah Rencana Kontingensi Tahun 2018 – 2020...	47
Grafik 3.14	Data Indeks Pinjal Di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018 – 2020.....	48
Grafik 3.15	Data HI Perimeter di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018 – 2020.....	48
Grafik 3.16	Data Survei Larva Anopheles di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018-2020.....	49
Grafik 3.17	Kepadatan Kecoa di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018 – 2020.....	49
Grafik 3.18	Kepadatan Lalat di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018 – 2020.....	50
Grafik 3.19	Trend Jumlah Pemeriksaan TTU yang Memenuhi Syarat KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 – 2020.....	50
Grafik 3.20	TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 – 2020	51
Grafik 3.21	Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat KKP Kelas I Soekarno Hatta tahun 2018 – 2020.....	52
Grafik 3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-3 dengan Target RAK Tahun 2024	53
Grafik 3.23	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-3 KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020.....	53
Grafik 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator 4 Tahun 2020.....	58
Grafik 3.25	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2018-2020.....	59
Grafik 3.26	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 dengan Target RAK Tahun 2024	59
Grafik 3.27	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan Renstra Kemenkes Tahun 2020.....	60
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 KKP Kelas I Soekarno-	



	Hatta dan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020	60
Grafik 3.29	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator 5 Tahun 2020.....	64
Grafik 3.30	Perbandingan Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2018-2020	64
Grafik 3.31	Perbandingan Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan Renstra Kemenkes Tahun 2020	65
Grafik 3.32	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020.....	66
Grafik 3.33	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator 6 Tahun 2020.....	68
Grafik 3.34	Perbandingan Nilai Kinerja Implementasi WBK Tahun 2019-2020..	69
Grafik 3.35	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 dengan Target RAK Tahun 2024	70
Grafik 3.36	Perbandingan Nilai Implementasi WBK Satker KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan Renstra Kemenkes Tahun 2020	70
Grafik 3.37	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020.....	71
Grafik 3.38	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator 7 Tahun 2020.....	74
Grafik 3.39	Perbandingan Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2018-2020	75
Grafik 3.40	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020.....	75
Grafik 3.41	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 KKP Kelas I Soekarno Hatta	76
Grafik 3.42	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 KKP Kelas I Soekarno Hatta	78
Grafik 3.43	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 -2019 KKP Kelas I Soekarno Hatta	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020	6
--	---



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi pengukuran kinerja dan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015-2020, khususnya target kinerja tahun 2020.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Tugas KKP Kelas I Soekarno-Hatta adalah mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara internasional terbesar dan terpadat penerbangannya di Indonesia sedangkan Bandara Halim Perdanakusuma merupakan bandara khusus untuk kegiatan protokoler kenegaraan dan berbagai *charter flight* dan pada tahun 2017 mulai digunakan untuk penerbangan komersial. Sehingga keberhasilan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam melaksanakan tugasnya menjadi sangat penting dalam menjaga kewibawaan Bangsa dan Negara Indonesia.



B. ISU STRATEGIS

Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.

International Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan, memperkuat dan mempertahankan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan melakukan respon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. Selain itu setiap negara mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC). Negara-negara anggota juga harus melakukan penyesuaian legal dan administrasi untuk memfasilitasi kepatutan terhadap IHR 2005.

Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktivitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.

Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma merupakan bandara yang memiliki aktivitas tinggi akan pergerakan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.



Jumlah penerbangan kedatangan dan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta dari internasional dan domestik tahun 2020 rata-rata sebanyak 551 pesawat per hari dengan jumlah penumpang rata-rata 54,399 orang per hari. Sedangkan jumlah penerbangan kedatangan dan keberangkatan di Bandara Halim Perdanakusuma dari internasional dan domestik rata-rata sebanyak 82 pesawat per hari dengan jumlah penumpang rata-rata 5.409 orang per hari.

Saat ini dunia sedang dilanda kecemasan yang luar biasa disebabkan oleh munculnya bencana besar yaitu wabah virus Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara. Kemajuan teknologi transportasi yang membantu kemudahan dan kecepatan mobilitas manusia antar negara dan benua memfasilitasi penyebaran virus Covid-19. Sampai tanggal 29 Desember 2020, Indonesia telah melaporkan 727.122 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 21.703 kematian.



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas KKP Kelas I Soekarno-Hatta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, KKP Kelas I Soekarno-Hatta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;



13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas negara;
16. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
17. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KKP.

Tujuh belas fungsi diatas terdapat dalam indikator kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%, sehingga dapat mencapai tujuan KKP Kelas I Soekarno-Hatta yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.



D. STRUKTUR ORGANISASI

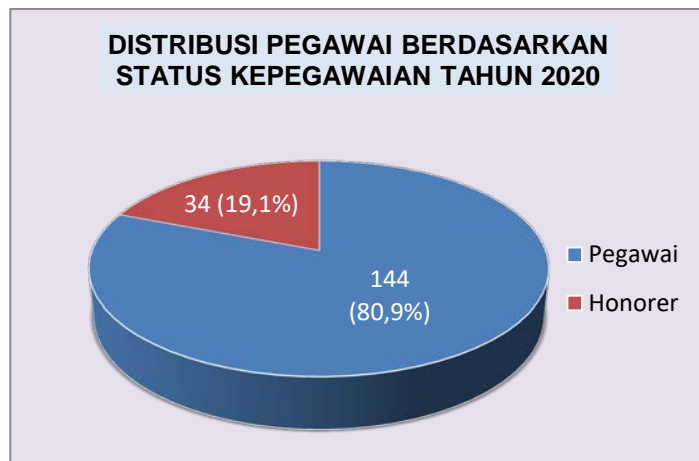
Gambar 1.1
Struktur Organisasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta



E. SUMBER DAYA MANUSIA

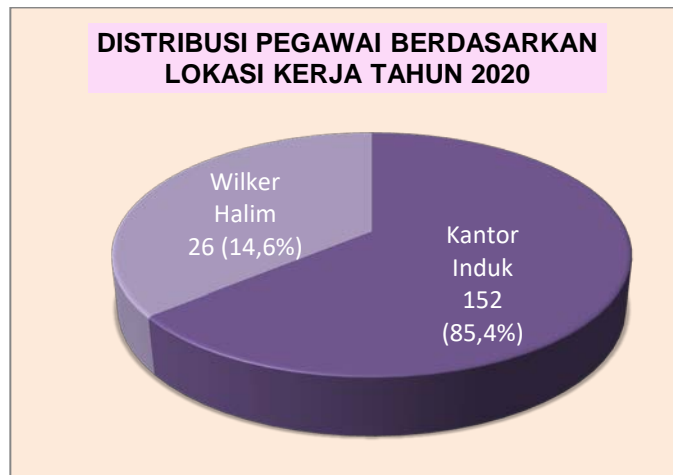
Pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2020 sebanyak 178 orang yang terdiri dari 144 orang (80,9%) Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 34 orang (19,1%) pegawai honorer.

Grafik 1.1



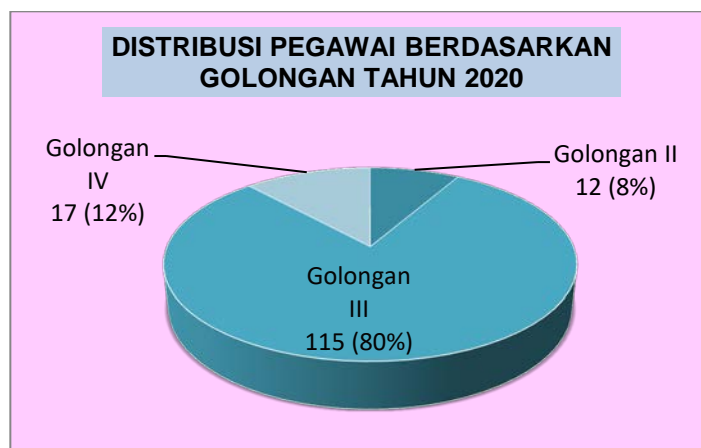
Distribusi pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta berdasarkan lokasi kerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.2



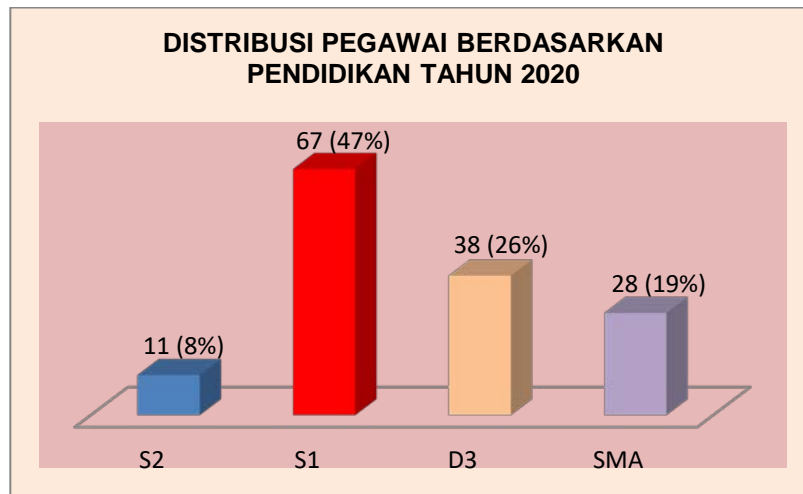
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 152 pegawai (85,4%) ditempatkan di Kantor Induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta dan 26 pegawai (14,6%) ditempatkan di Wilker Halim Perdanakusuma.

Grafik 1.3



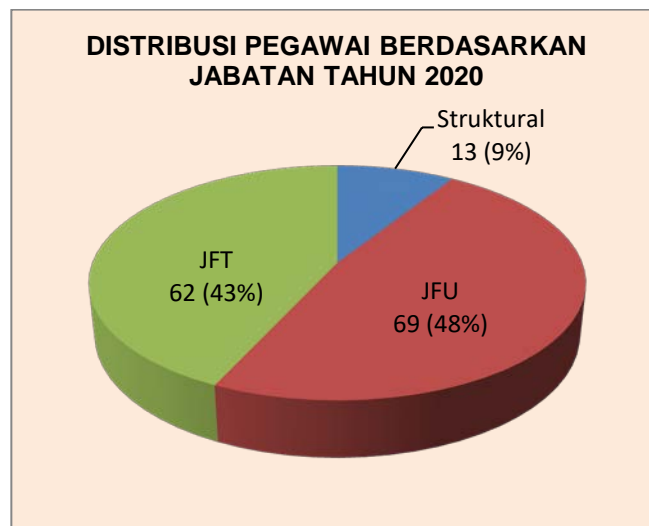
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dari 144 orang Aparatur Sipil Negara, sebagian besar pegawai 151 orang (80%) memiliki golongan pangkat III, 17 orang (12%) memiliki golongan pangkat IV dan 12 orang (8%) memiliki golongan pangkat II.

Grafik 1.4



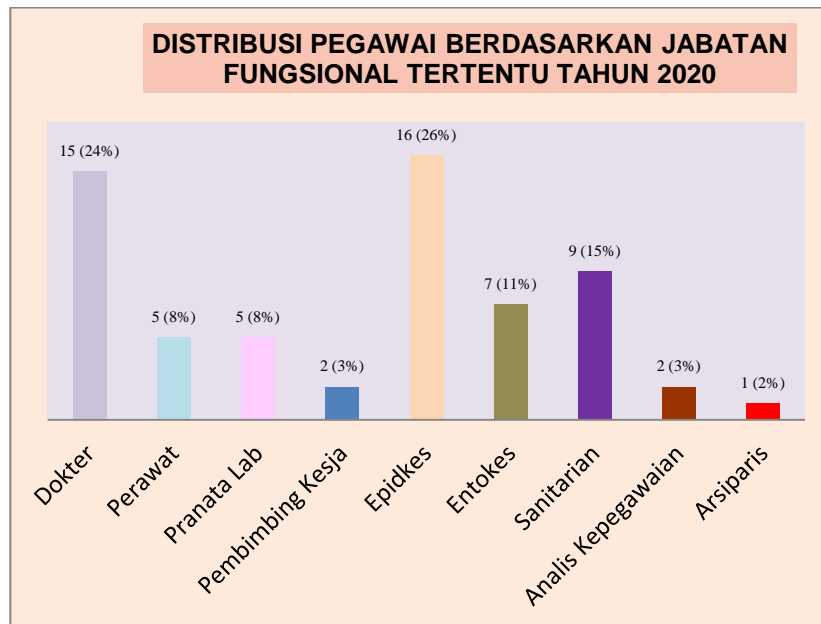
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa distribusi pegawai berdasarkan pendidikan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebagai berikut: 47% (67 orang) berpendidikan SI, 26% (38 orang) berpendidikan D3, 19% (28 orang) berpendidikan SLTA, 8% (11 orang) berpendidikan S2.

Grafik 1.5



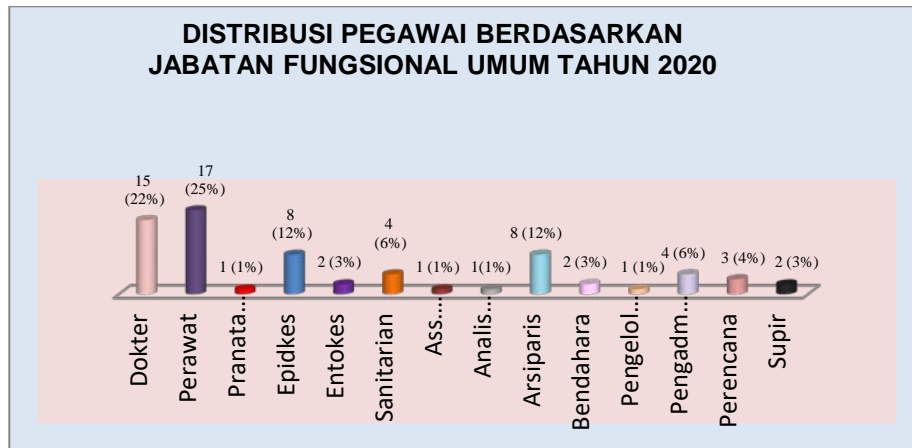
Dari grafik di atas terlihat bahwa 69 orang (48%) memiliki jabatan fungsional umum, 62 orang (43%) memiliki jabatan fungsional tertentu dan 13 orang (9%) adalah pejabat struktural.

Grafik 1.6



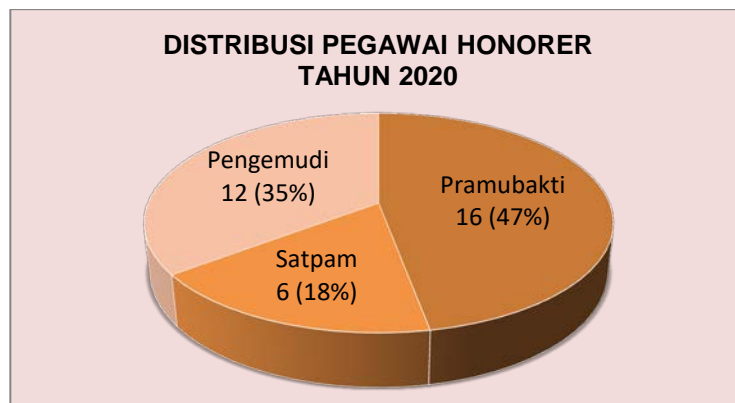
Dari grafik 1.6 di atas terlihat bahwa dari 62 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, persentase terbanyak adalah epidemiolog kesehatan 16 orang (26%), dokter 15 orang (24%), sanitarian 9 orang (15%), entomolog kesehatan 7 orang (11%), perawat dan pranata laboratorium masing-masing 5 orang (8%), pembimbing kesehatan kerja dan analisis kepegawaian masing-masing 2 orang (3%) dan arsiparis 1 orang (2%). Sedangkan gambaran pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.7



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dari 69 pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum, persentase terbanyak adalah perawat 17 orang (25%), dokter 15 orang (22%), epidemiolog kesehatan dan arsiparis masing-masing 8 orang (12%).

Grafik 1.8



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dari 34 pegawai honorer di KKP Kelas I Soekarno-Hatta, persentase terbanyak adalah pramubakti 16 orang (47%), Pengemudi 12 orang (35%) dan satpam 6 orang (18%).

Data distribusi pegawai di atas menunjukkan kekuatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dari segi sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya. Selama tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 hampir seluruh pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta ditugaskan di lapangan baik di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Dengan situasi penerbangan yang sudah kembali normal dan jumlah penumpang yang selalu meningkat setiap harinya, menyebabkan

KKP Kelas I Soekarno-Hatta mengambil kebijakan bahwa seluruh pegawai baik ASN maupun non ASN, kesehatan maupun non kesehatan ikut terlibat dalam pengawasan dan pengendalian Covid-19 karena meskipun situasi penerbangan sudah berangsur normal namun tetap harus menggunakan protokol kesehatan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) KKP Kelas I Soekarno-Hatta, pemenuhan jumlah pegawai berdasarkan hal tersebut masih belum sesuai. Maka ke depannya perlu peningkatan kemampuan kinerja Sumber Daya Manusia dari aspek kuantitas, kualitas, dan komposisi, dengan penambahan tenaga medis, pelatihan-pelatihan teknis, dalam rangka melaksanakan tugas rutin cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020 adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada unit utama Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KKP Kelas I Soekarno-Hatta untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 disusun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2461 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan yang terdiri dari:

- Bab I (Pendahuluan)
Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)
Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2020.
- Bab III (Akuntabilitas Kinerja)



Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2020, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya lain yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja

- Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. KKP Kelas I Soekarno-Hatta menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024

RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta 2015–2020 diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran program Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Dalam RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2015 - 2020 tidak ada visi dan misi unit kerja, namun mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu:

a. Visi

Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong

b. Misi

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan



KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui indikator-indikator kinerja yang relevan dengan RAP dan Renstra Kemenkes.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada periode tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah.

d. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada periode tahun 2020-2024 adalah meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

e. Indikator Kinerja 2020-2024

Tabel 2.1
Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan	8.127.205	8.533.565	8.960.243	9.408.255	9.878.667
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	96%	97%	98%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%	90%	92%	94%	96%
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	86	89	92



5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	80	-	-	-	-
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	93	94	95	96
7	Nilai kinerja implementasi WBK satker	70	72	74	76	78
8	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	82%	84%	86%

f. Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KKP Kelas I Soekarno-Hatta melaksanakan lima kegiatan pada tahun 2020 yang terdiri dari:

- 1) Surveilans dan karantina kesehatan;
- 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan
- 5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK Tahun 2020-2024 yang berisi indikator kinerja dan target tahunan, serta gambaran kegiatan dan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2020.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian



kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta disusun mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	8.127.205
		b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		c. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%
		d. Nilai kinerja anggaran	80
		e. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	80%
		f. Nilai kinerja implementasi WBK satker	70
		g. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari RAK KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020-2024. Adapun untuk mengetahui capaian kinerja dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020, terdapat 7 indikator kinerja dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	8.127.205	16.072.033	197,8%
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	100%	111,1%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85%	112,3%	132,1%
4	Nilai kinerja anggaran	80	90,02	112,5%
5	Tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	90%	112,5%
6	Nilai kinerja implementasi WBK satker	70	80,58	115,1%
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	66,0%	146,7%
RATA-RATA CAPAIAN				132,5%

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu 132,5% dimana terdapat 7 indikator dengan capaian kinerja lebih dari 100%. Berikut pencapaian dari masing-masing indikator.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan

1. Pengertian

Kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan terdiri dari :

a. Pemeriksaan orang

1) Pengawasan dokumen kesehatan penumpang

- Pengawasan dokumen *International Certificate of Vaccination* (ICV) untuk memastikan seluruh jemaah umroh, pelaku perjalanan umum, dan jemaah haji baik regular maupun khusus yang akan berangkat ke Arab Saudi telah mendapatkan vaksinasi meningitis demi meminimalisir kemungkinan infeksi meningitis.
- Selama masa peningkatan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19, dilakukan pemeriksaan dan validasi terhadap dokumen-dokumen kesehatan baik di area domestik maupun internasional yang secara resmi dimulai pada bulan Juni 2020. Dokumen kesehatan yang diperiksa meliputi surat keterangan rapid test antibodi, test antigen, test PCR pada pelaku perjalanan keberangkatan domestik, surat keterangan hasil PCR bagi pelaku perjalanan kedatangan internasional, Klirens Kesehatan dan/atau Pengantar Karantina bagi pelaku perjalanan kedatangan internasional, dan surat keterangan hasil PCR bagi pelaku perjalan keberangkatan internasional tujuan Hongkong. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan dalam upaya skrining cegah

tangkal persebaran Covid-19 baik di lingkup domestik maupun internasional.

2) Pemeriksaan suhu tubuh penumpang dan personil serta pengawasan HAC

Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat *Thermal Scanner* (TS) dilakukan dalam rangka pengawasan tanda dan gejala baik pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri yang datang dari wilayah terjangkit. Apabila terdapat pelaku perjalanan yang terdeteksi suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ maka dilakukan *Risk Assesment* untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara apakah pelaku perjalanan tersebut berisiko atau tidak. Laporan hasil wawancara dengan pelaku perjalanan yang datang dari negara terjangkit kemudian langsung dikirim ke posko KLB Ditjen P2P Kemenkes RI.

Selanjutnya pengawasan pelaku perjalanan melalui *Health Alert Card* (HAC) maupun e-HAC dilakukan dalam rangka surveilans pelaku perjalanan serta pengawasan tanda dan gejala mandiri baik dalam negeri maupun luar negeri yang datang dari wilayah terjangkit. Sehubungan dengan dideklarasikannya Pandemi Covid-19 semenjak Maret 2020, setiap kedatangan internasional harus mengisi HAC / e-HAC. Pengawasan HAC / e-HAC kemudian diperluas ke ranah penerbangan domestik sebagai upaya pencegahan persebaran di dalam negeri dan juga sebagai bentuk notifikasi kewaspadaan ke wilayah. Petugas KKP memastikan HAC / e-HAC sudah terisi dengan lengkap kemudian melakukan notifikasi ke wilayah melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC).

3) Pemeriksaan Rapid Test Covid-19

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19, KKP Kelas I Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan rapid test antibodi di Terminal 3 Kedatangan Internasional pada pelaku perjalanan yang menunjukkan gejala dan/atau berisiko tinggi pada awak kapal dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum membawa dokumen hasil PCR negatif. Pemeriksaan rapid test



antibodi ini dilakukan dalam upaya skrining cegah tangkal masuknya Covid-19 di kedatangan internasional.

4) Tracing dan testing kasus dalam rangka skrining Covid-19

Pengambilan Swab Test PCR bagi para petugas berisiko tinggi di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Pengambilan Swab Test PCR ini ditujukan baik sebagai skrining massal untuk memetakan persebaran Covid-19 pada lingkup internal petugas dan juga sebagai upaya *contact tracing* dari kasus positif Covid-19 petugas yang terlapor. Urgensi dari kegiatan ini adalah untuk menghentikan persebaran penyakit di antara sesama petugas secara cepat sehingga dapat mengurangi hambatan dalam menjalankan tupoksi akibat dari SDM yang berkurang karena terpapar Covid-19.

5) Skrining penyakit menular langsung

Skrining penyakit menular langsung meliputi penyakit TB dan HIV-AIDS. Skrining untuk pengendalian penyakit adalah pemeriksaan terhadap orang-orang yang tidak memiliki gejala ataupun keluhan (asimtomatik) untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit (*as likely or unlikely to have disease*).

6) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat jenazah)

Penerbitan dokumen kesehatan berdasarkan permintaan / permohonan pasien yang berkunjung ke KKP Kelas I Soekarno Hatta. Dokumen kesehatan yang diterbitkan berupa ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat izin angkut jenazah.

b. Pemeriksaan alat angkut

1) Jumlah pesawat yang diperiksa melalui dokumen *Health Part Aircraft General Declaration* (HPAGD)

Kegiatan ini merupakan pemeriksaan dokumen perjalanan internasional yang berisi peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/personel yang sakit atau berpotensi membawa penyakit menular. Pengawasan HPAGD meliputi operator



yang bertugas, asal penerbangan, nomor penerbangan, tanggal, asal penerbangan, tujuan penerbangan, nama dan jumlah personel pesawat, jumlah penumpang yang berangkat, jumlah penumpang yang turun, deklarasi kesehatan, dan keterangan disinfeksi pesawat.

2) Jumlah *Certificate of Pratique* (COP)

COP adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada pesawat yang datang dari luar negeri dan atau daerah terjangkit.

3) Jumlah Pemeriksaan Sanitasi Pesawat

Jumlah frekuensi pemeriksaan sanitasi pesawat yang dilakukan dalam rangka kekarantinaan kesehatan melalui pemeriksaan faktor risiko sanitasi dan keberadaan vektor di pesawat yang terdiri dari :

- Pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi pesawat.
- Pemeriksaan insidentiil dalam rangka pengawasan sanitasi pesawat internal oleh maskapai.
- Pengawasan pelaksanaan desinfeksi mandiri oleh maskapai dalam rangka pencegahan faktor risiko COVID-19.
- Pemeriksaan pesawat yang mengangkut supek berupa hasil RDT antibodi reaktif dan atau membawa hasil PCR positif COVID-19.

c. Pemeriksaan barang

1) Pemeriksaan barang bawaan

Dalam rangka pengawasan alat angkut dan muatannya, pemeriksaan barang dilakukan di terminal Cargo Bandara Soekarno-Hatta untuk mengetahui faktor risiko kesehatan atau bahaya nuklir, biologi, dan kimia (nubika) yang mungkin dibawa/terbawa oleh barang komoditi. Apabila ditemukan faktor risiko pada barang maka akan dilakukan tindakan kekarantinaan berupa dekontaminasi dengan kegiatan desinfeksi.

2) Penerbitan sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Adiktif (OMKABA)

Pengawasan lalu lintas OMKABA dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen muatan dan barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Hasil pengawasan berupa penerbitan Surat Keterangan Kesehatan OMKABA yang



bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara Soekarno-Hatta tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

3) Pemeriksaan sampel spesimen

Pengawasan sampel spesimen berupa sampel sum-sum tulang, sel tali pusat, dan embrio manusia. Kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan barang komoditi terhadap kelengkapan hasil uji lab, analisis laboratorium, dan tujuan penggunaan pengiriman sampel.

d. Pemeriksaan lingkungan

1) Jumlah pemeriksaan sanitasi TTU

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan. dengan cara Untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi Gedung/bangunan dan lingkungan. dan menyampaikan Hasil pemeriksaan disampaikan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Jumlah pemeriksaan sanitasi TPM

Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan higiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya jumlah orang, barang, alat angkut, dan lingkungan yang dilakukan pemeriksaan oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

2. Definisi Operasional

Akumulasi jumlah pemeriksaan/penapisan orang, pemeriksaan alat angkut, pemeriksaan barang, dan pemeriksaan lingkungan dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus/Cara Perhitungan

$$\text{Capaian indikator pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan} = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100\%$$

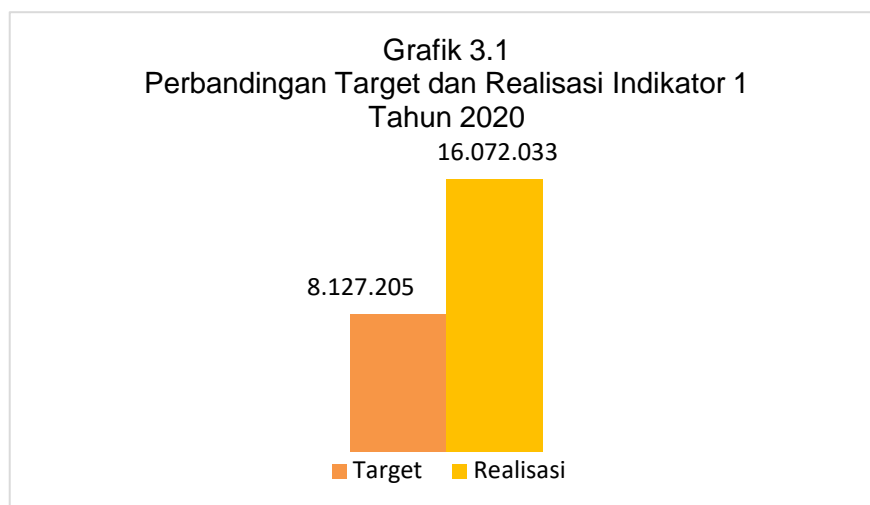
4. Capaian Indikator

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 3.2
Jumlah Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan

No	Item	Jumlah
I	Jumlah Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan	
A	Pemeriksaan/ Penapisan orang	16.038.237
1	Pengawasan dokumen kesehatan penumpang	
	• Dokumen ICV	131.977
	• Dokumen kesehatan ((pemeriksaan hasil PCR, antigen, rapid, klirens, dan pengantar karantina)	4.475.132
2	Pemeriksaan suhu tubuh penumpang & personil dan pengawasan HAC	11.352.729
3	Pemeriksaan Rapid Test Covid-19	45.471
4	Tracing dan testing kasus dalam rangka skrining Covid-19	2.292
5	Screening penyakit menular langsung	
	• Pemeriksaan TB	212
	• Pemeriksaan HIV/AIDS	102
6	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat jenazah)	30.322
B	Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	28.322
1	Jumlah pesawat yang diperiksa (Dokumen HPAGD))	14.819
2	Jumlah Certificate of Pratique (COP)	479
3	Jumlah Pemeriksaan Sanitasi Pesawat	13024

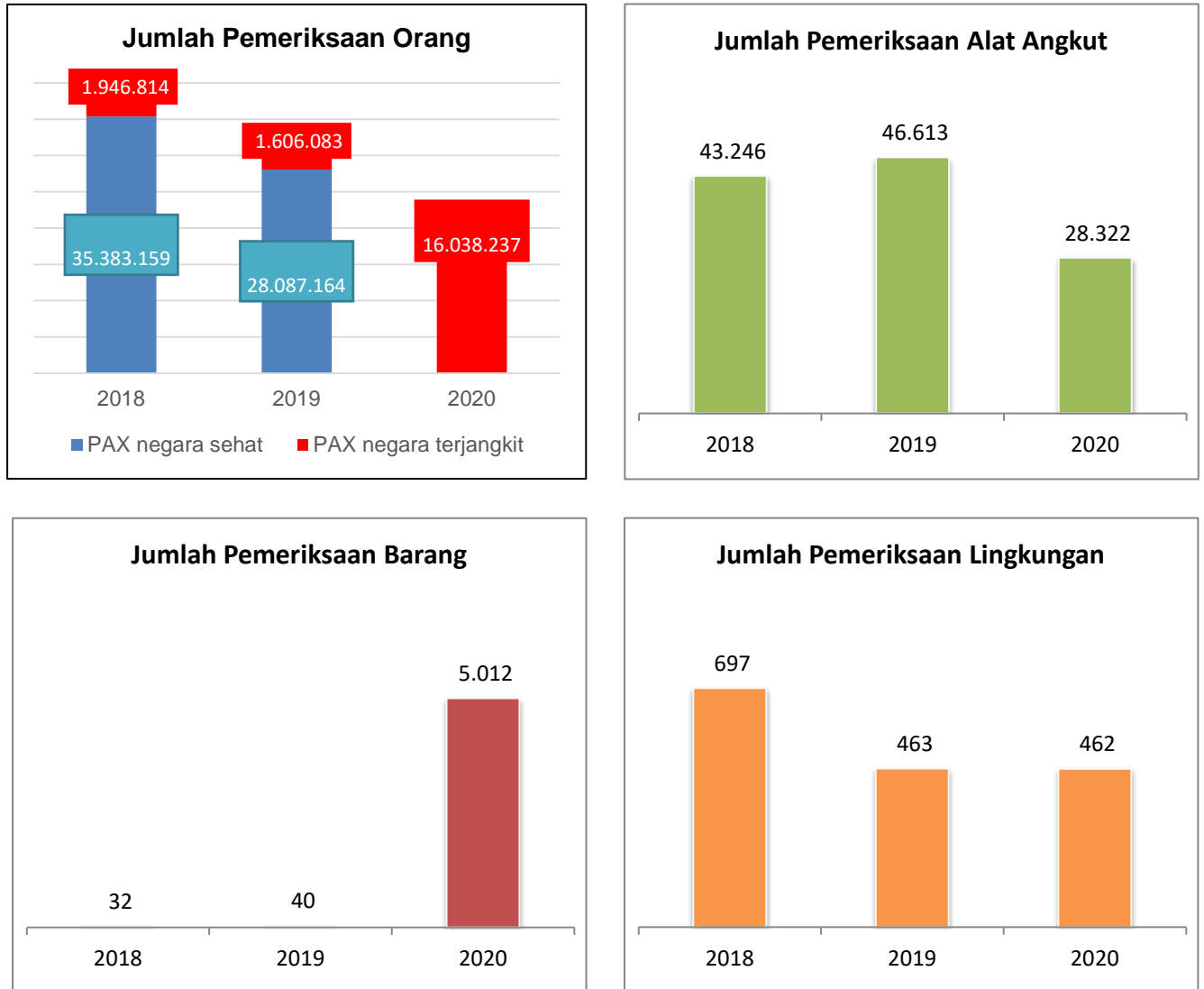
C	Pemeriksaan Barang	5.012
1	Jumlah barang cargo	4.566
2	Jumlah pemeriksaan barang OMKABA	22
3	Jumlah pemeriksaan sampel specimen	424
D	Pemeriksaan Lingkungan	462
1	Jumlah pemeriksaan sanitasi TTU	288
2	Jumlah pemeriksaan sanitasi TPM	174
JUMLAH		16.072.033



Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sesuai standar karantina pada tahun 2020 yaitu 16.072.033 dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 8.127.205, sehingga capaian kinerjanya sebesar 197,8%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Grafik 3.2
Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan Tahun 2018-2020



Pada grafik diatas diketahui sebagai berikut:

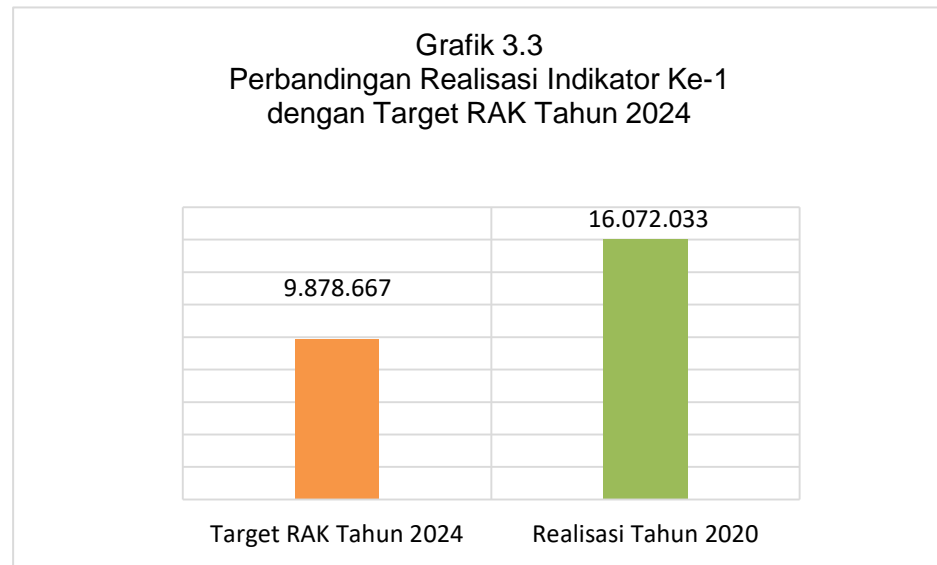
- Jumlah pemeriksaan orang pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2018 dan 2019, namun beban kerja pada tahun 2020 jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana pada masa pandemi Covid-19 jumlah penumpang dari dan ke wilayah terjangkit yang dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan (pemeriksaan suhu tubuh, saturasi bagi penumpang dan RDT bagi penumpang yang

berisiko, dan pemeriksaan dokumen kesehatan bagi setiap pelaku perjalanan) jauh lebih banyak.

- Jumlah pemeriksaan alat angkut pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2018 dan 2019 dikarenakan pada tahun 2020 hampir seluruh daerah, dan negara lain karena adanya pembatasan perjalanan baik internasional maupun domestik. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini dilakukan tindakan kekarantinaan pada alat angkut yang berisiko menjadi sumber penularan penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).
- Jumlah pemeriksaan barang pada tahun 2020 yaitu 5.012 melebihi jumlah pemeriksaan pada tahun sebelumnya karena pada tahun 2018 dan 2019 belum dilakukan pengawasan secara intensif ke cargo dan kegiatan yang dilakukan hanya berupa koordinasi dan sampling. Pada tahun 2020 melakukan peningkatan pelayanan dengan melakukan pengawasan keluar masuknya barang khususnya OMKABA. Selain itu di awal pandemi Covid-19, pemeriksaan spesimen Covid-19 di wilayah masih terbatas, dengan demikian semua sampel suspek dikirimkan melalui cargo dan dibawah pengawasan KKP Soetta untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium tujuan.
- Jumlah pemeriksaan lingkungan pada tahun 2018 sebanyak 697 tempat dan menurun pada tahun 2019 yaitu 463 tempat, serta pada tahun 2020 sebanyak 462 tempat. Hal ini terjadi karena terdapat pembatasan pelayanan bandara baik di Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma sebagai implementasi dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga terdapat TTU yang tidak beroperasi (Area Terminal 1A, 1B, 1C, stasiun kereta dan beberapa lokasi lainnya). Dengan penutupan area terminal tersebut berpengaruh terhadap jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang beroperasi.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020-2024)

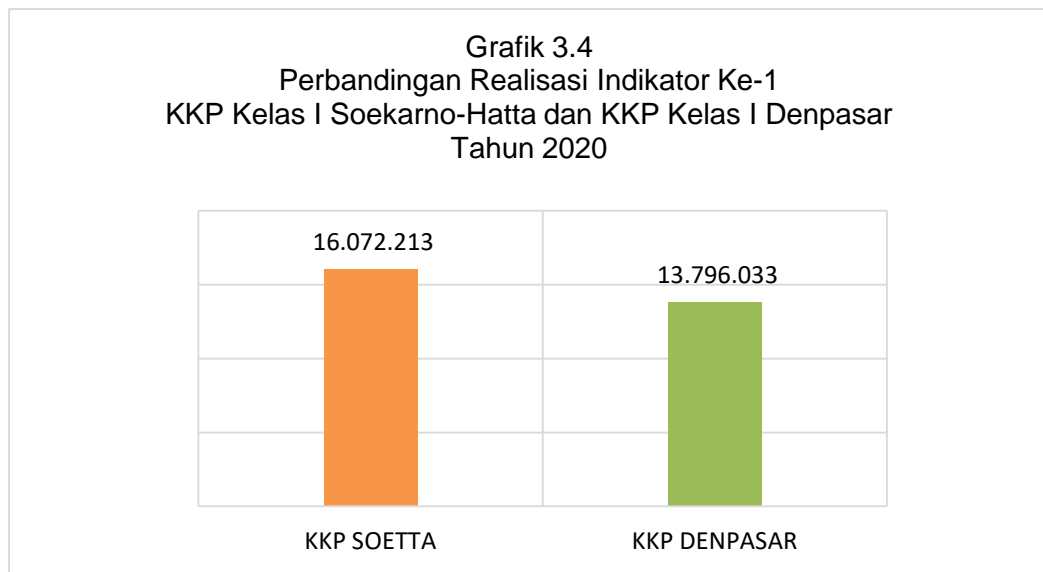


Realisasi indikator pemeriksaan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan pada tahun 2020 yaitu 16.072.033 dan telah melebihi target RAK tahun 2024 yaitu 9.878.667.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator pemeriksaan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 86%.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Organisasi Sejenis/Setara



Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan yang dilakukan oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta lebih tinggi dibandingkan dengan KKP Kelas I Denpasar. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebanyak 16.072.033 sedangkan jumlah pemeriksaan yang dilakukan KKP Kelas I Denpasar sebanyak 13.796.997.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator pemeriksaan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan dapat tercapai. Faktor penyebab keberhasilan diantaranya:

- a. Dalam situasi pandemi Covid-19 mengharuskan setiap Negara mengikuti peraturan kesehatan (*International Health Regulation*) Tahun 2005 pada pengawasan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan yang didukung oleh peraturan nasional dan daerah.
- b. Upaya-upaya dalam rangka cegah tangkal di pintu masuk negara semakin diperketat pada seluruh kedatangan internasional, kemudian diperluas ke ranah penerbangan domestik sejak ditemukan adanya transmisi lokal Covid-19.
- c. Jumlah SDM yang bertugas di lapangan pun ditambah dengan dukungan dari pegawai masing-masing bidang/bagian dan adanya

penambahan tenaga Bantuan Kendali Operasional dari Ditjen P2P serta tenaga relawan.

- d. Adanya tenaga kesehatan yang berkompeten dalam melakukan pengambilan sampel Swab Test PCR dan deteksi dini penyakit menular langsung TB dan HIV-AIDS.

6. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, kerjasama dengan lintas sektor, dan dukungan penganggaran. Adapun upaya lebih lanjut dari masing-masing sub indikator sebagai berikut:

a. Pemeriksaan orang

- 1) Berkoordinasi dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) dan agen perjalanan haji dan umroh mengenai kewajiban calon jemaah umroh/haji untuk melakukan vaksinasi meningitis yang dibuktikan dengan kepemilikan buku ICV resmi. Selain itu bekerja sama dengan Kemenag dan maskapai untuk koordinasi data keberangkatan. Apabila ditemukan ketidaktertiban di lapangan, maka PPNS KKP Soetta akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Menerapkan prosedur perjalanan orang sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku selama masa pandemi Covid-19 serta melakukan sosialisasi baik melalui surat resmi ke LS/LP terkait (PT AP II, maskapai, dan ground handling) dan juga membuat banner maupun e-poster. Selain itu menjalin kerja sama dengan tim Satgas Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta.
- 3) Membuat nota dinas kepada petugas untuk melakukan pengawasan kelengkapan data di HAC (beserta tanda dan gejala) pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit serta sosialisasi penggunaan eHAC kepada maskapai dan seluruh penumpang kedatangan internasional dan penerbangan (kedatangan dan keberangkatan) domestik.



- 4) Berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk menyampaikan pengumuman di atas pesawat jika terdapat penumpang yang sakit untuk melapor ke awak kabin pesawat dan wajib melaporkan kepada pihak KKP untuk dilakukan penanganan sesuai yang dibutuhkan sesegera mungkin dan dilakukan pengawasan suhu terhadap kedatangan pelaku perjalanan internasional maupun domestik
 - 5) Melakukan upaya skrining pelaku perjalanan di kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta khususnya yang berisiko tinggi (ABK, PMI, dan yang menunjukkan tanda/gejala)
 - 6) Peningkatan kapasitas petugas dalam pengambilan sampel Swab Test PCR
 - 7) Pengambilan Swab Test PCR bagi para petugas berisiko tinggi di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta sekaligus *contact tracing* pada petugas LS/LP yang berisiko tinggi kontak erat dengan kasus positif pada pelaku perjalanan.
 - 8) Melakukan sosialisasi secara terbatas dan skrining penyakit menular TB dengan wawancara melalui google form.
 - 9) Penerbitan dokumen kesehatan dilakukan melalui website <https://sinkarkes.kemkes.go.id/>.
 - 10) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan dokumen kesehatan (ICV, surat laik terbang, surat sehat, sertifikat sehat, surat jenazah)
- b. Pemeriksaan alat angkut
- 1) Berkoordinasi dengan maskapai dan ground handling terkait kewajiban maskapai untuk menyerahkan dokumen Gendec kepada petugas KKP di kedatangan internasional.
 - 2) Berkoordinasi dengan pihak maskapai dan Air Traffic Control (ATC) sehubungan dengan kewajiban maskapai untuk melaporkan keadaan di pesawat ada tidaknya penumpang berpenyakit menular potensial wabah, masih atau tidak berlakunya sertifikat sanitasi pesawat, dan sertifikat P3K pesawat.
 - 3) Menerapkan sistem pemeriksaan desinfeksi pesawat secara mandiri oleh maskapai secara daring melalui link <http://bit.ly/DISINFEKSI-PESAWAT>.



c. Pemeriksaan barang

- 1) Berkoordinasi dengan pihak Kargo Bandara Soekarno-Hatta terkait informasi jenis dan jumlah lalu lintas barang kargo khususnya OMKABA. Data terkait lalu lintas barang kargo kemudian diolah dan dianalisis untuk kemudian dijadikan dasar kebutuhan penilaian risiko (*risk assessment*) di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta.
- 2) Melaksanakan pengawasan baik terhadap OMKABA impor maupun ekspor di Bandara Soekarno Hatta. Melakukan penerbitan sertifikat OMKABA.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap sampel COVID-19 dari daerah untuk dikirimkan ke laboratorium pemerintah, dan bekerjasama dengan bidang PRL untuk melakukan desinfeksi.

d. Pemeriksaan lingkungan

- 1) Jumlah pemeriksaan sanitasi TTU
Tetap melakukan pemeriksaan higiene sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan di sela sela jadwal piket pengawasan orang, barang dan lingkungan dalam upaya mengurangi persebaran penularan COVID-19 di pintu masuk Negara.
- 2) Jumlah pemeriksaan sanitasi TPM
Tetap melaksanakan pemeriksaan tempat pengelolaan makanan (TPM) yang masih beroperasi pada saat libur piket jaga.

7. Kendala / Masalah yang Dihadapi

- a. Tingginya jumlah kedatangan pesawat dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta dengan jadwal kedatangan yang tidak real time serta belum semua maskapai memberikan HPAGD, dan terbatasnya jumlah SDM maka belum semua pesawat dari luar negeri diterbitkan sertifikat COP.
- b. Keterbatasan jumlah SDM untuk ditugaskan di lapangan dengan beban pekerjaan yang lebih banyak saat pandemi Covid-19.
- c. Ketersediaan tempat pelayanan saat keadaan tertentu (kepadatan jadwal kedatangan pesawat) sehingga dapat menyebabkan penumpukan penumpang.



- d. Adanya perubahan kebijakan terkait Covid-19 yang dinamis dan perlu dilakukan penyesuaian di lapangan.
- e. Keterbatasan pelayanan kesehatan karena kebijakan PSBB diantaranya sosialisasi dan skrining penyakit menular langsung TB dan HIV-AIDS.
- f. Menurunnya jumlah pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV sehubungan dengan ditiadakannya pelaksanaan ibadah umroh dan haji oleh pemerintah Arab Saudi.
- g. Terdapat lokasi atau area pemeriksaan TTU yang tidak beroperasi/tutup seperti Terminal 1 (A, B dan C), Terminal 2F di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa lokasi di Bandara Halim Perdanakusuma yang mempengaruhi capaian jumlah lokasi pemeriksaan.
- h. Dengan ditutupnya beberapa terminal berpengaruh terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang beroperasi sehingga mengurangi capaian jumlah frekuensi pemeriksaan TPM.

8. Pemecahan Masalah

- a. Koordinasi dengan maskapai untuk mengirimkan HPAGD baik secara langsung/manual ataupun melalui email.
- b. Penambahan tenaga relawan sebanyak 90 orang yang tersebar di Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk membantu validasi dokumen kesehatan penumpang.
- c. Rencana diberlakukannya penggunaan QR Code yang terregistasi untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dokumen kesehatan penumpang di lapangan.
- d. Berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura II sebagai penyelenggara Bandara Soekarno-Hatta.
- e. Sosialisasi kebijakan terbaru kepada petugas di lapangan dan penumpang.
- f. Skrining penyakit menular TB dengan wawancara melalui google form, jika ditemukan ada responden yang diduga menderita penyakit menular, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- g. Menunggu kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah umroh dan penerbitan dokumen kesehatan khususnya penerbitan ICV.
- h. Tetap melaksanakan pengawasan/pemeriksaan higiene sanitasi TTU dan TPM terhadap lokasi/sarana yang masih beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- i. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan higiene sanitasi TPM secara maksimal terhadap lokasi/sarana yang masih beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a. Petugas yang ditugaskan di lapangan tidak hanya berasal dari bidang-bidang teknis, namun ditempatkan juga pegawai dari non teknis seperti Bagian Tata Usaha, BKO dari Ditjen P2P, khususnya untuk membantu pengawasan lalu lintas penumpang dan personil baik di kedatangan maupun keberangkatan domestik dan internasional.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan teknis dan dukungan teknis dalam rangka kekarantinaan kesehatan dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan TA 2020.
- c. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini yaitu Rp. 4.497.936.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.091.892.100 atau 99,8% dan dapat mencapai kinerja sebesar 197,2%, sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.

INDIKATOR 2

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

1. Pengertian

Indikator faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan merupakan indikator yang memberikan gambaran upaya pengendalian yang dilakukan terhadap temuan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan diantaranya :

❖ **Faktor Risiko Orang :**

- a. Penemuan dokumen kesehatan penumpang yang tidak valid
- b. Personil dan penumpang dengan suhu melebihi 38°C atau terdapat risiko kesehatan lain yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat lain
- c. Kondisi kesehatan penumpang tidak laik terbang
- d. Penemuan kasus TB dan HIV positif
- e. Penumpang dengan hasil reaktif dan/atau positif Covid-19

❖ **Faktor Risiko Alat Angkut :**

- a. Pesawat yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- b. Pesawat yang datang dari daerah terjangkit atau mengangkut penumpang dengan hasil hasil reaktif dan/atau positif Covid-19

❖ **Faktor Risiko Barang :**

- a. Barang yang berisiko kesehatan

❖ **Faktor Risiko Lingkungan :**

- 1) Tempat-Tempat Umum yang tidak memenuhi syarat kesehatan
- 2) Tempat Pengelolaan Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sehingga faktor risiko tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

2. Definisi Operasional

Faktor risiko kesehatan yang dikendalikan berdasarkan temuan pada kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

3. Rumus/Cara Perhitungan

Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	=	$\frac{\text{Jumlah faktor risiko yang dikendalikan}}{\text{Jumlah faktor risiko yang ditemukan}} \times 100\%$
---	---	---

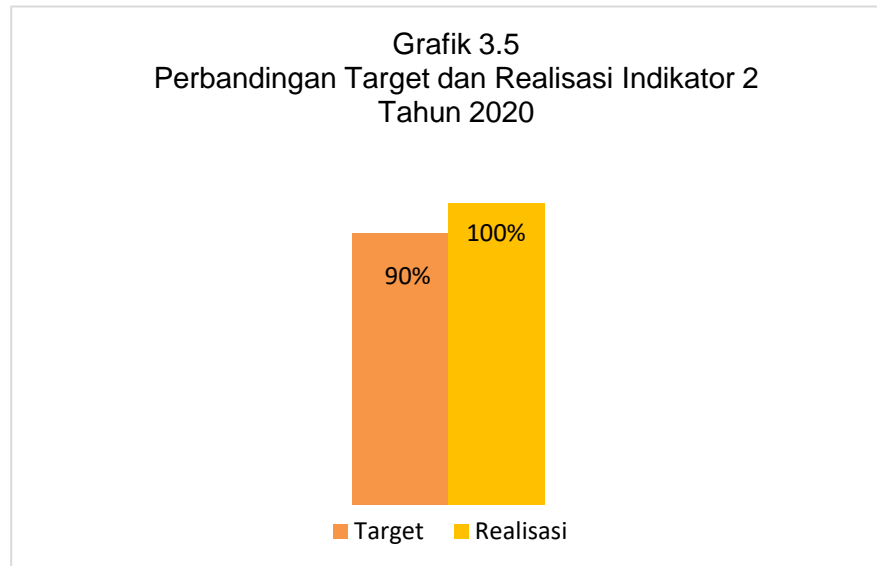
4. Capaian Indikator

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 3.3
Faktor Risiko Orang, Barang, Alat Angkut, dan Lingkungan yang Ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2020

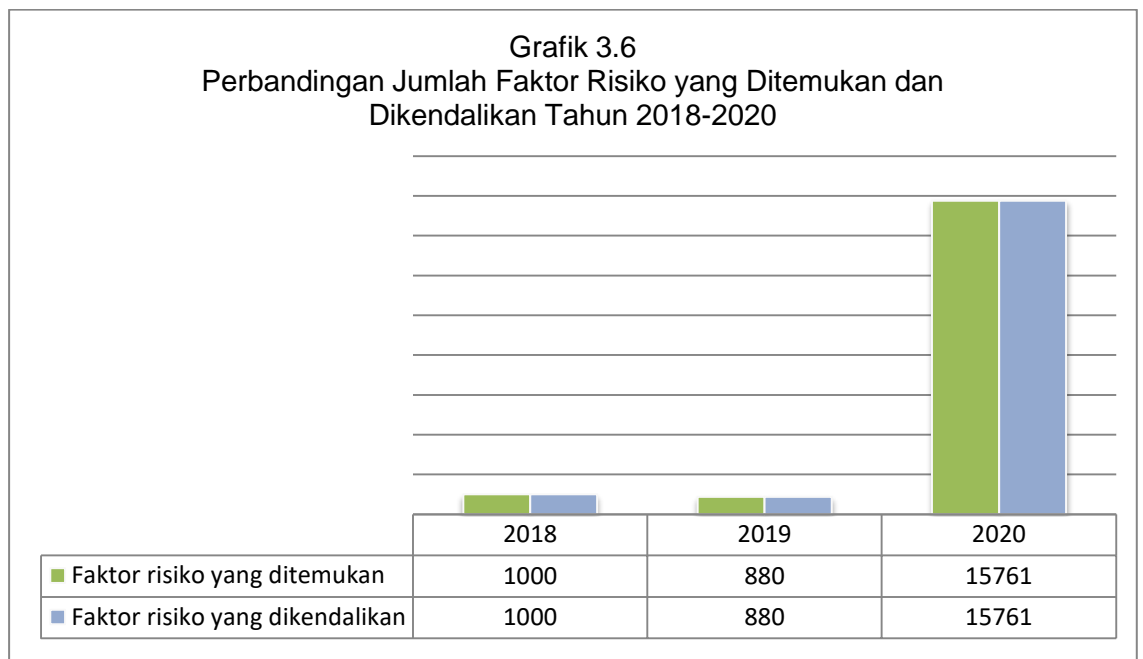
No	Faktor Risiko	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR yang dikendalikan
A	Faktor Risiko Orang		
1	Jumlah dokumen kesehatan yang tidak valid	11	11
2	Jumlah penumpang dan personil dengan suhu >38 C dan notifikasi	38	38
3	Jumlah penumpang dengan hasil reaktif Covid-19 (rapid test/PCR)	956	956
4	Jumlah peserta skrining penyakit menular (HIV dan TB) dengan hasil positif	0	0
5	Jumlah penumpang yang tidak laik terbang	372	372
B	Faktor Risiko Alat Angkut		
1	Jumlah alat angkut yang berisiko kesehatan	12.986	12.986
C	Faktor Risiko Barang		
1	Jumlah barang yang berisiko kesehatan	1.381	1.381
D	Faktor Risiko Lingkungan		
1	Jumlah TTU yang TMS	12	12
2	Jumlah TPM yang TMS	5	5
JUMLAH		15.761	15.761

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah faktor risiko penyakit yang ditemukan sebanyak 15.761 faktor risiko dan yang dilakukan pengendalian sebanyak 15.761 faktor risiko, maka 100% faktor risiko telah dikendalikan.



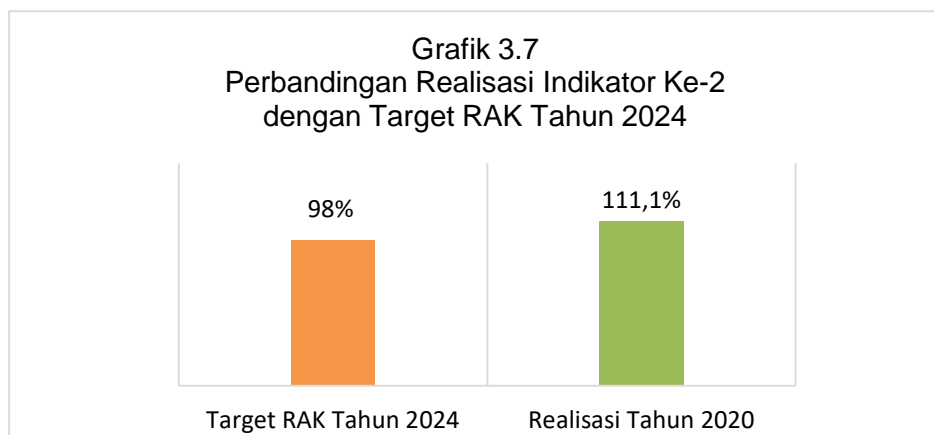
Dari grafik diatas diketahui realisasi tahun 2020 sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 90% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 111,1%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



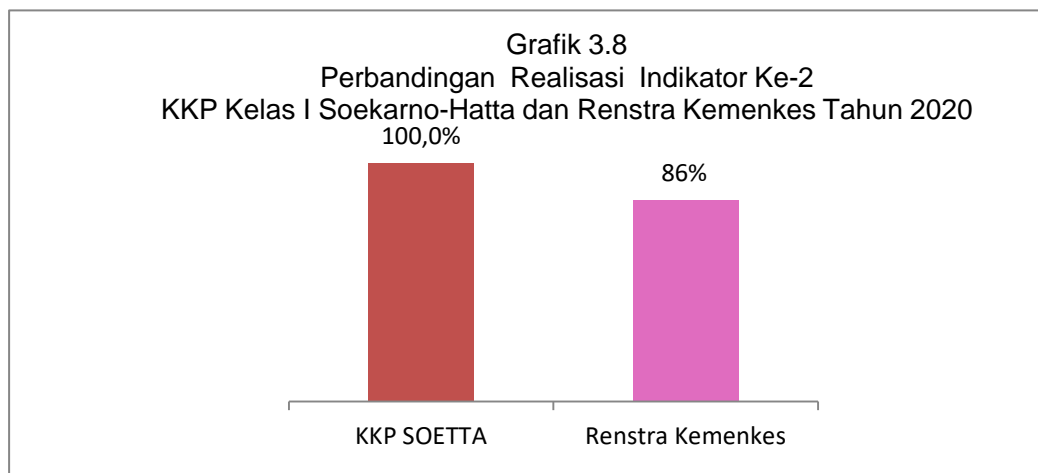
Pada grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 semua faktor risiko yang yang ditemukan pada kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah dikendalikan 100%. Jumlah faktor risiko yang ditemukan fluktuatif setiap tahunnya dan pada tahun 2020 ini meningkat tajam sehubungan dengan munculnya pandemi Covid-19.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024)



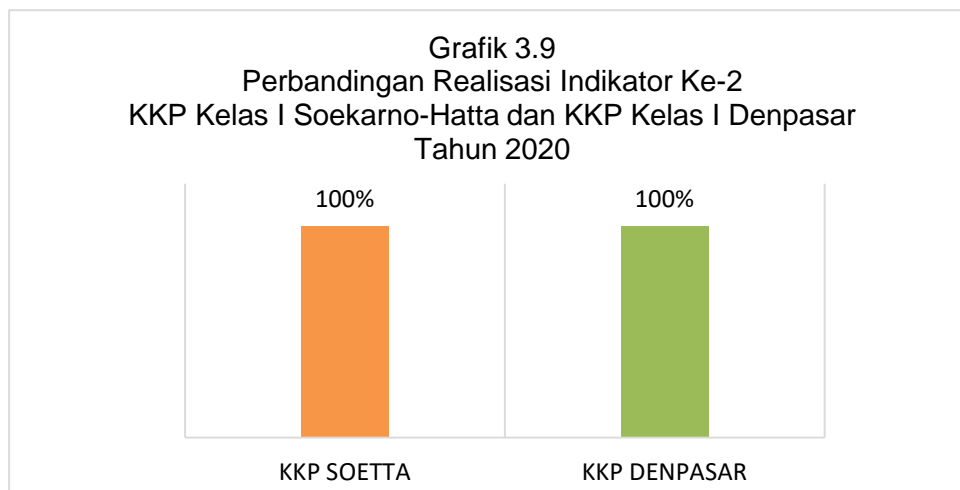
Realisasi indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2020 yaitu 111,1% dan telah melebihi target RAK tahun 2024 yaitu 98%.

d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional



Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada indikator faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2020 telah melebihi target indikator tersebut pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 yaitu 86%.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Organisasi Sejenis/Setara



Dari grafik diatas terlihat bahwa faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan oleh KKP Kelas I Soekarno-Hatta sama dengan dengan KKP Kelas I Denpasar yaitu 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain telah terbentuknya Tim Gerak Cepat dan Tim Kesiapsiagaan dan Pengendalian Penyakit Covid-19 KKP Kelas I Soekarno-Hatta, sosialisasi rutin peraturan dan kebijakan terbaru terkait Covid-19 kepada petugas di lapangan, pemeriksaan kesehatan penumpang yang tidak laik terbang sesuai dengan standar. Selain itu dengan menerapkan pengawasan desinfeksi pesawat mandiri secara daring mempermudah maskapai dalam memberikan laporan dan mempercepat KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam memberikan pengawasan kemudian menerbitkan surat keterangan desinfeksi, hal ini secara langsung meningkatkan jumlah pesawat yang

dilakukan pengawasan/pemeriksaan, menjalin kerja sama dengan lintas sektor di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta diantaranya PT. Angkasa Pura II, Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, Satuan Gugus Tugas Covid-19 Bandara Soetta, dan lainnya.

6. Upaya/Kegiatan yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian risiko yang ditemukan yaitu :

a. Faktor risiko orang

- 1) Menindaklanjuti dugaan dokumen kesehatan penumpang yang tidak valid dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada laboratorium yang bersangkutan dan jika terbukti palsu melaporkan kepada pihak yang berwajib
- 2) Menerbitkan surat tidak laik terbang terhadap penumpang yang tidak laik terbang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan
- 3) Bagi penumpang domestik yang menunjukkan dokumen hasil rapid test antibodi reaktif dan rapid antigen positif dilakukan edukasi untuk karantina mandiri dan melakukan pemeriksaan PCR mandiri. Pada penumpang yang menunjukkan dokumen dengan hasil PCR positif, maka penumpang dirujuk ke RSDC Wisma Atlet atau Wisma Karantina Pademangan. Bagi penumpang internasional, jika pada pemeriksaan rapid test antibodi ditemukan terdapat penumpang yang reaktif, maka penumpang tersebut dirujuk ke Wisma Karantina Pademangan. Apabila penumpang membawa dokumen hasil PCR positif, maka penumpang dirujuk ke RSDC Wisma Atlet atau Wisma Karantina.

b. Faktor risiko alat angkut

Melakukan pemeriksaan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) alat angkut (pesawat) dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi pesawat, pemeriksaan insidental sebagai upaya pengawasan atas pelaksanaan sanitasi pesawat internal, dan pengawasan pelaksanaan desinfeksi mandiri yang dilaksanakan secara daring melalui <http://bit.ly/DISINFEKSI-PESAWAT>.



c. Faktor risiko barang

Melakukan tindakan desinfeksi terhadap barang yang berisiko terhadap persebaran COVID-19, berupa barang yang berasal dari penumpang suspek, penumpang dengan hasil PCR positif, dan sampel spesimen.

d. Faktor risiko lingkungan

Melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM). Pemeriksaan dilakukan terhadap faktor risiko sanitasi dan keberadaan vektor agar tidak menjadi faktor risiko penularan penyakit melalui media lingkungan. bagi TTU dan TPM dengan nilai Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan dilakukan pembinaan berupa pemberian rekomendasi saran perbaikan serta diberikan waktu untuk melaksanakan perbaikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali. Jika terdapat permasalahan yang harus dilakukan lintas sektor maka akan dibawa dalam pertemuan dengan mengundang lintas sektor dan stakeholder.

7. Kendala / Permasalahan

- a. Dalam pengawasan lalu lintas orang terdapat kendala yaitu kemungkinan orang yang datang dalam kondisi belum menunjukkan gejala atau telah meminum obat penurun panas sehingga ketika melewati alat pemindai suhu orang tersebut tidak terdeteksi demam.
- b. Saat ini hampir semua fasilitas kesehatan (Klinik dan Rumah Sakit) dapat menerbitkan dokumen kesehatan, namun belum semua terdaftar di jejaring Laboratorium Litbang, sehingga sulit untuk mengetahui validitas dokumen kesehatan tersebut.
- c. Sulitnya deteksi dini penyakit menular langsung karena adanya stigma masyarakat khususnya terhadap HIV-AIDS yang masih tinggi
- d. Tingginya jumlah kedatangan pesawat dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta dengan jadwal kedatangan yang tidak real time serta belum semua maskapai memberikan Gendec, dan terbatasnya jumlah SDM maka belum semua pesawat dari luar negeri diterbitkan sertifikat COP.

- e. Kurangnya partisipasi pihak maskapai mengenai Higiene Sanitasi pesawat dan tidak ada aturan serta sanksi yang jelas bagi maskapai yang terkait pelaksanaan higiene sanitasi pesawat.
- f. Belum adanya peraturan baku mengenai barang tentengan yang harus dilakukan pengawasan
- g. Kurangnya kepedulian pihak pengelola TPM/ TTU mengenai Higiene Sanitasi

8. Pemecahan Masalah

- a. Menggunakan e HAC sebagai bentuk pemantauan lewat Dinas Kesehatan setempat
- b. Rencana diberlakukannya penggunaan QR Code yang terregistasi untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dokumen kesehatan penumpang di lapangan
- c. Sosialisasi tentang penyakit menular langsung TB dan HIV-AIDS kepada lintas program dan lintas sektor bandara.
- d. Koordinasi dengan maskapai untuk mengirimkan Gendec baik secara langsung/manual ataupun melalui email
- e. Sosialisasi tentang tata aturan higiene sanitasi di pesawat
- f. Barang-barang penumpang yang di konfirmasi penyakit KKM, bekerja sama dengan bidang PRL untuk dilakukan tindakan desinfeksi.
- g. Membuat surat edaran bersama yaitu Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, SGM KCU PT. Angkasa pura II (Persero) Soekarno-Hatta Internasional Airport, dan KKP Kelas I Soekarno-Hatta tentang tindak lanjut deklarasi bersama pengendalian vektor terintegrasi dan mewujudkan Jasa Boga, Rumah Makan, dan Restoran bersertifikasi Laik Higiene Sanitasi.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a. Penggunaan bahan reagen rapid test yang didistribusikan dari pusat secara maksimal dan tepat sasaran.
- b. Pemilihan bahan desinfektan dengan tingkat efektivitas residu yang baik bagi bakteri dan virus.



- c. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini yaitu Rp. 1.181.221.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.144.018.980 atau 96,9% dan dapat mencapai kinerja sebesar 111,1%, sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.



INDIKATOR 3

Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

1. Pengertian

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dilakukan dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun untuk mengendalikan faktor risiko masuk dan keluarnya penyakit yang terdapat dalam alat angkut dan muatannya. Indikator ini terdiri dari 11 sub indikator yaitu:

a) Kelengkapan Data Surveilans

Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.

b) Jumlah Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam

Data hasil pengawasan terhadap faktor risiko terjadinya PHEIC dianalisis untuk mengetahui ada/tidaknya atau besar/kecilnya faktor risiko yang berpotensi dapat menimbulkan PHEIC di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk kemudian dapat dilakukan tindakan segera/respon cepat terhadap faktor risiko PHEIC tersebut, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri, atau sebagai masukan bagi pengelola Bandara dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat (Ditjen P2P Kemkes RI).

c) Penyusunan Rencana Kontingensi

Rencana Kontingensi merupakan dokumen yang berisi kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Tujuan disusunnya dokumen ini adalah terwujudnya kesepakatan dari berbagai pihak terkait dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*)” terutama di tahun ini adalah dalam masa penanganan Covid 19 di pintu masuk negara.

d) Pengendalian Indeks Pinjal ≤ 1

Indeks pinjal adalah angka yang menunjukkan kepadatan pinjal pada tubuh tikus. Indeks Pinjal digunakan untuk mengetahui kepadatan investasi rata-rata dari pinjal yang ditemukan pada jumlah tikus yang tertangkap.

e) HI perimeter = 0

House Index perimeter merupakan persentase bangunan yang positif jentik dari seluruh bangunan yang di periksa yang ada di area perimeter Bandara. Nilainya harus nol sesuai dengan dengan yang dipersyaratkan secara internasional di wilayah pintu masuk negara.

f) Tidak Ditemukan Larva *Anopheles*

Tidak ditemukan larva *Anopheles sp* artinya adalah berdasarkan identifikasi larva dari hasil pengamatan yang dilakukan, tidak ditemukan larva *Anopheles sp*.

g) Kepadatan Kecoa Rendah

Kepadatan kecoa merupakan salah satu indikator kondisi higiene sanitasi suatu tempat atau lingkungan. Berdasarkan Permenkes No. 50 tahun 2017, kepadatan kecoa dikatakan rendah atau memenuhi satandar baku mutu apabila nilainya kurang dari 2.

h) Kepadatan Lalat < 2

Kepadatan lalat adalah suatu indikator kurang optimalnya cara pengelolaan sampah atau rendahnya kondisi higiene sanitasi pada suatu tempat. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan berkaitan dengan penyebab penyakit diare sebagai salah satu *vector borne disease*. Kepadatan lalat dikatakan rendah apabila berdasarkan hasil pengukuran nilainya adalah kurang dari dua.

i) Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat

Tempat-tempat umum memenuhi syarat yakni merupakan kondisi sanitasi tempat-tempat umum dimana tidak terdapat faktor risiko penularan peyakit sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi penggunanya.

j) Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat

Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPM terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).

k) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan seluruh bandara, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan pesawat (water car, Ground Support Sistem dan catering/jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (drinking water).

2. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

3. Rumus/Cara Perhitungan

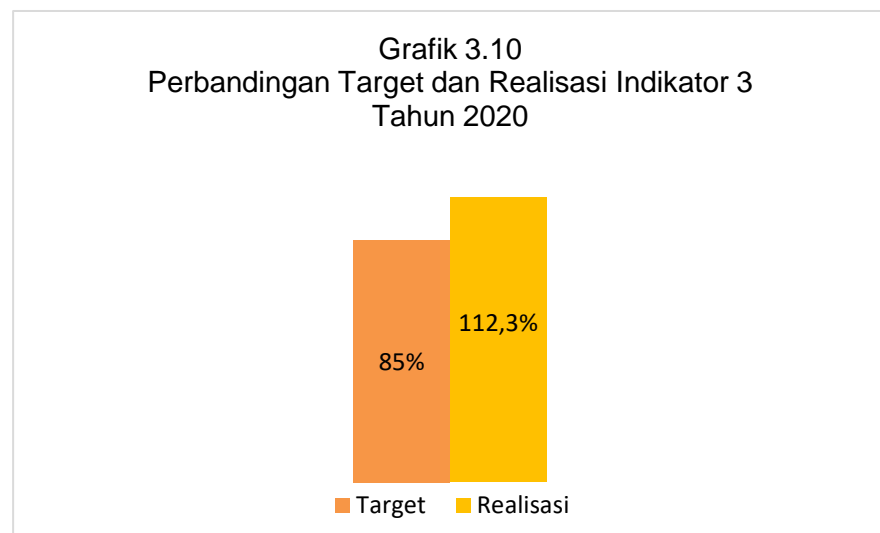
$$\text{Persentase indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara} = \frac{\text{Jumlah capaian indeks pengendalian faktor risiko}}{\text{Jumlah sub indikator indeks pengendalian faktor risiko}} \times 100\%$$

4. Capaian Indikator

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko Tahun 2020

No	Indeks Pengendalian Faktor Risiko	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kelengkapan data surveilans	laporan	12	12	100%
2	Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	sinyal	302.071	302.071	100%
3	Penyusunan rencana kontigensi	dokumen	1	1	100%
4	Indeks pinjal ≤ 1	bandara	2	2	100%
5	HI perimeter = 0	bandara	2	2	100%
6	Tidak ditemukan larva anopheles	bandara	2	2	100%
7	Kepadatan kecoa rendah	bandara	2	2	100%
8	Kepadatan lalat < 2	bandara	2	2	100%
9	TTU memenuhi syarat	tempat	118	276	233,9%
10	TPM laik hygiene	tempat	156	146	93,6%
11	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	sarana	72	78	108,3%
Rata-rata Capaian					112.3%

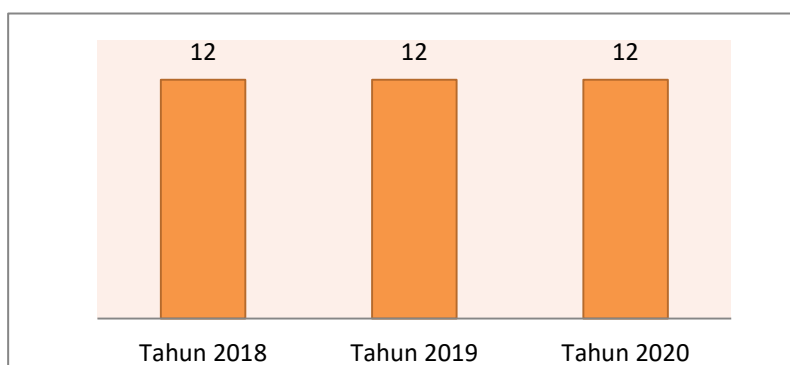


Dari grafik diatas diketahui realisasi tahun 2020 yaitu 112,3% dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 85% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 132,1%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

1) Kelengkapan Data Surveilans

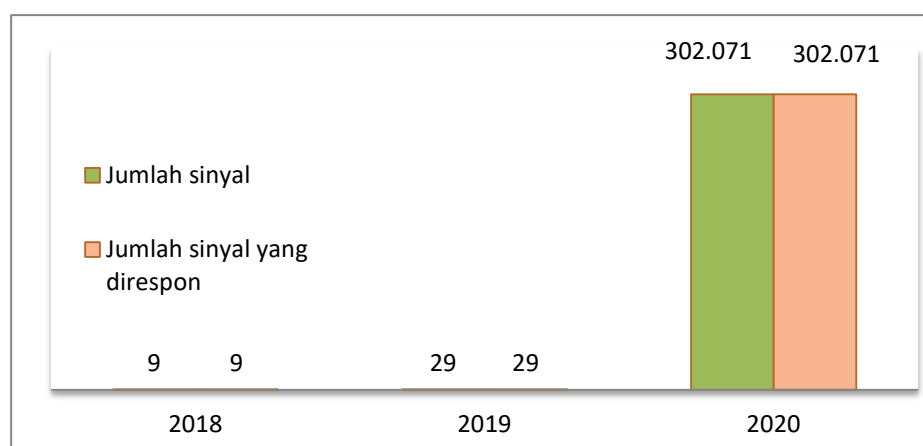
Grafik 3.11
Perbandingan Jumlah Surveilans Rutin Tahun 2018 - 2020



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah laporan surveilans pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tetap yaitu sebanyak 12 laporan. Surveilans epidemiologi penyakit dilakukan melalui data kejadian KLB serta data kunjungan poliklinik KKP dan poliklinik non KKP yang berada di wilayah bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma.

2) Jumlah Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam

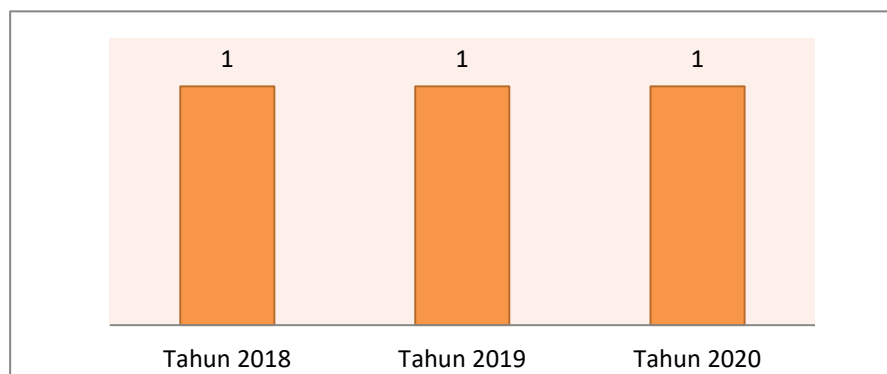
Grafik 3.12
Perbandingan Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam Tahun 2018 - 2020



Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 semua respon sinyal SKD, KLB, dan bencana telah direspon kurang dari 24 jam. Jumlah sinyal SKD mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 302.071 kasus yang direspon. Kasus ini berupa pengawasan seluruh kedatangan penumpang dari luar negeri di Terminal 3 Internasional sebagai respon terhadap pandemic Covid-19.

3) Penyusunan Rencana Kontingensi

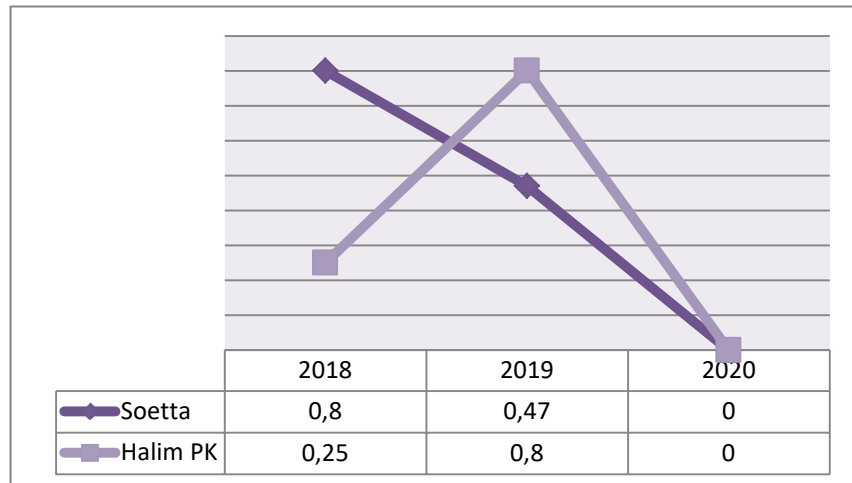
Grafik 3.13
Perbandingan Jumlah Rencana Kontingensi Tahun 2018 - 2020



KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah memiliki dokumen rencana kontingensi di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dilakukan review dokumen rencana kontingensi setiap tahun secara bergiliran antara Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Review dokumen rencana kontingensi pada tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober dengan mengundang lintas sektor antara lain PT Angkasa Pura II (Persero), PKPPK, Groundhandling, Otoritas Bandara, Polres dan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Tangerang, Rumah Sakit, Puskesmas di sekitar wilayah Bandara Soekarno Hatta.

4) Pengendalian Indeks Pinjal ≤ 1

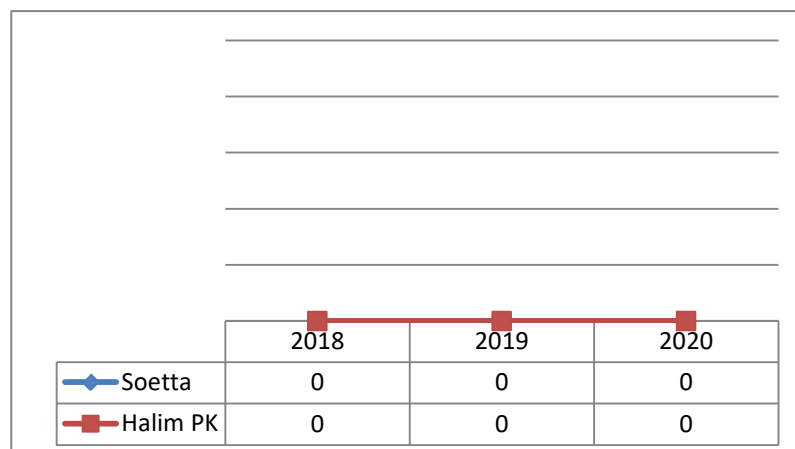
Grafik 3.14
Data Indeks Pinjal Di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma
Tahun 2018 - 2020



Nilai indeks pinjal khusus di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma dari kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 adalah kurang dari satu. Oleh karena itu keduanya dapat dikatakan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 sehingga diinterpretasikan tidak menjadi faktor risiko dalam penyebaran penyakit Pes.

5) HI perimeter = 0

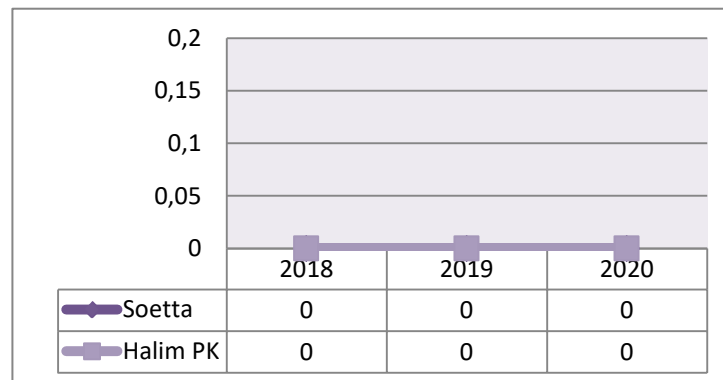
Grafik 3.15
Data HI Perimeter di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma
Tahun 2018 - 2020



House Index di wilayah perimeter baik di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma selama tiga tahun terakhir adalah nol. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam *International Health Regulation* tahun 2015. Hal tersebut juga karena peran aktif kader dalam menekan perkembangbiakan larva nyamuk khususnya di area indoor atau dalam bangunan.

6) Tidak Ditemukan Larva Anopheles

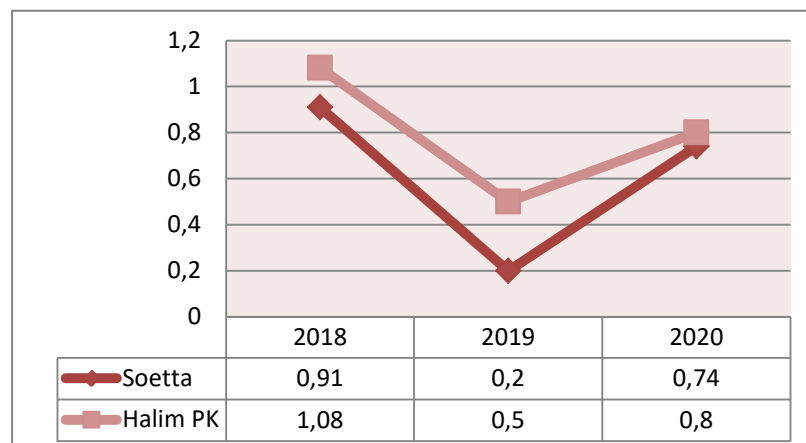
Grafik 3.16
Data Survei Larva Anopheles di Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018-2020



Seperti yang tergambar dalam grafik diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 - 2020 baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Halim Perdanakusuma tidak ditemukan larva *Anopheles*.

7) Kepadatan Kecoa Rendah

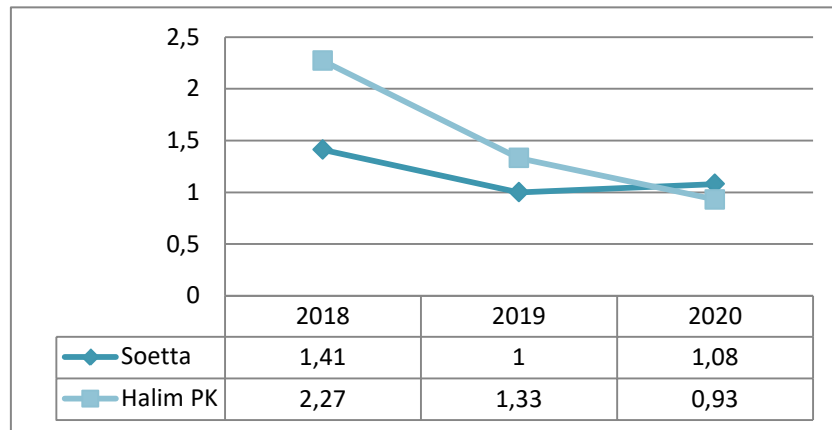
Grafik 3.17
Kepadatan Kecoa di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018 - 2020



Angka kepadatan kecoa di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma dari kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 adalah kurang dari dua. Oleh karena itu keduanya dapat dikatakan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Permenkes Nomor 50 Tahun 2017, dimana kepadatan dikatakan rendah jika nilainya kurang dari 2.

8) Kepadatan Lalat < 2

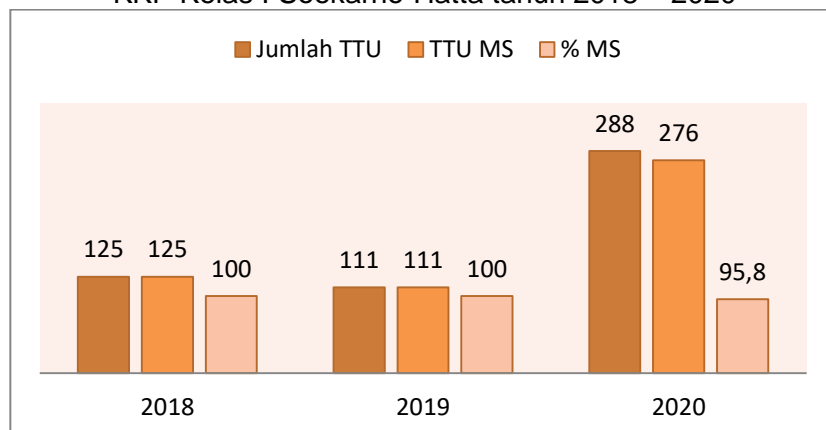
Grafik 3.18
Kepadatan Lalat di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Tahun 2018 - 2020



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tren kepadatan lalat di dua bandara mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi keberhasilan pengendalian vektor lalat di bandara.

9) Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat

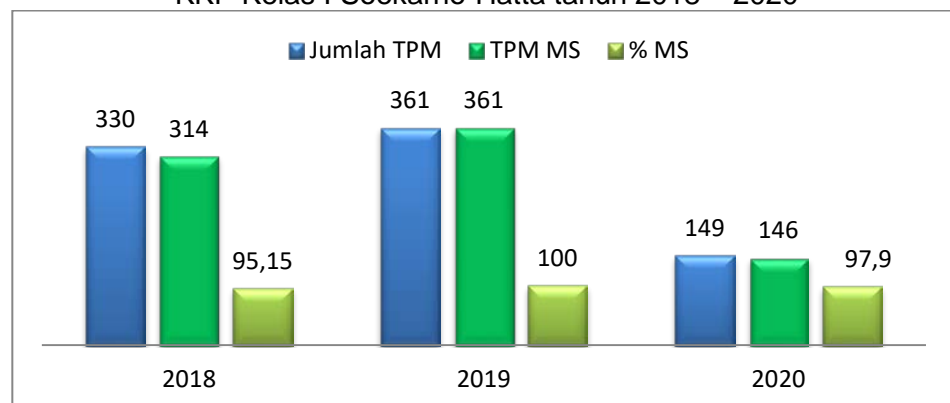
Grafik 3.19
Trend Jumlah Pemeriksaan TTU yang Memenuhi Syarat KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 – 2020



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pemeriksaan TTU setiap tahunnya selalu berubah. Pada tahun 2018 dan 2019 seluruh TTU yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan atau 100%. Pada tahun 2020 jumlah pemeriksaan TTU mencapai 288 kali dengan 276 kali memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan di Bandara Halim Perdanakusuma terdapat 20 lokasi TTU yang secara rutin dilakukan pemeriksaan setiap bulannya. Terdapat 12 kali pemeriksaan di 5 lokasi yang tidak memenuhi syarat. Terhadap lokasi-lokasi tersebut telah dilakukan pembinaan sehingga pada bulan Nopember dan Desember 2020 seluruh lokasi telah memenuhi syarat.

10) Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat

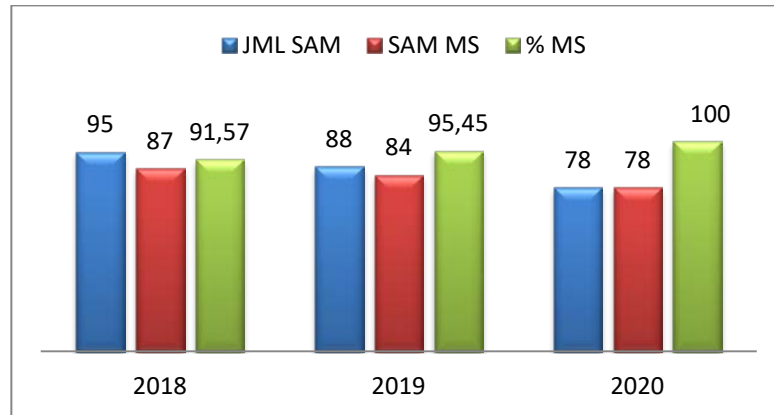
Grafik 3.20
TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan
KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 – 2020



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa proporsi TPM yang memenuhi syarat setiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2018 jumlah TPM memenuhi syarat mencapai 95,15% kemudian meningkat menjadi 100 % di tahun 2019 namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 97,9%. Hal ini disebabkan beberapa kondisi yaitu terdapat TPM yang masih belum memenuhi syarat sampai akhir tahun 2020, yaitu 2 TPM di Bandara Soetta dan 1 TPM di Bandara Halim Perdanakusuma. 1 TPM di Bandara Halim Perdanakusuma tersebut telah tutup sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan kembali.

11) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Grafik 3.21
Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat
KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2018 – 2020

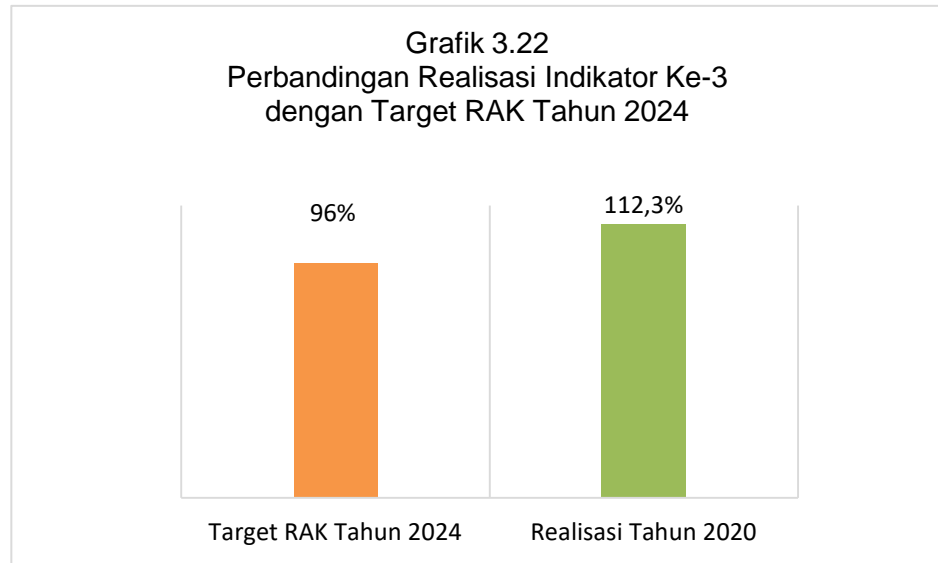


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi sarana air minum yang memenuhi syarat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 mencapai 91,57% kemudian meningkat menjadi 95,45% pada tahun 2019 dan menjadi 100% di tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah sarana air minum yang beroperasi mengalami penurunan dikarenakan pandemi tetapi pengawasan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dokumen hasil uji kualitas air minum yang dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara air minum.

Pada tahun 2020 Bandara Soekarno-Hatta mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2020



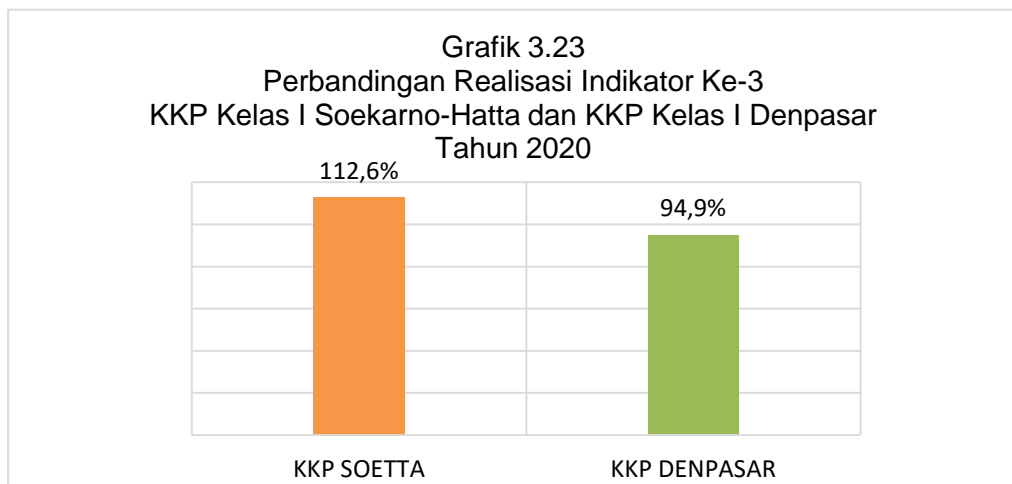
- c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020-2024)



Realisasi indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2020 yaitu 112,3%, telah melebihi target RAK tahun 2024 yaitu 96%.

- d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional
Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator pemeriksaan orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 86%.

- e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Organisasi Sejenis/Setara



Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi indeks faktor risiko penyakit di pintu masuk negara KKP Kelas I Soekarno-Hatta lebih besar dari KKP Kelas I Denpasar, dengan realisasi masing-masing yaitu 112,6% dan 94,9%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat mencapai target diantaranya karena :

- a. Jejaring kinerja petugas KKP dengan lintas sektor di Bandara semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan respon cepat terhadap tindak lanjut berupa rekomendasi perbaikan sarana TTU dan TPM yang tidak memenuhi syarat untuk segera dilakukan perbaikan kondisi hygiene sanitasi. Selain itu juga adanya kesadaran dari pihak penyelenggara air untuk melakukan uji kualitas air minum yang dikelolanya.
- b. Pencapaian target khususnya mengenai pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dapat dicapai karena koordinasi dan kerja sama yang baik dengan lintas sektor dan lintas program baik pemerintah, BUMN maupun swasta di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma. Koordinasi dan kerja sama ini seperti dengan memberdayakan kader dan penguatan program dengan dukungan pembiayaan dari berbagai lintas sektor tersebut. Selain itu dengan adanya alokasi dana terkait pencegahan dan pengendalian vektor, maka bahan dan peralatan untuk kegiatan tersedia dengan cukup.
- c. Sumber daya manusia baik tenaga entomolog kesehatan maupun sanitarian juga telah mengikuti beberapa pelatihan guna meningkatkan kapasitasnya dan profesionalisme sesuai dengan kompetensinya. Kegiatan pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan fungsional dan pelatihan teknis. Pelatihan fungsional yang diikuti berguna untuk meningkatkan profesionalisme sebagai pemangku jabatan fungsional. Selain itu di masa pandemi Covid-19 ini, banyak diselenggarakan pelatihan daring melalui webinar-webinar dengan penyelenggara dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P, Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesmas



maupun dari organisasi profesi seperti PEKI (Persatuan Entomolog Kesehatan Indonesia), dan HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia).

6. Upaya/Kegiatan yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian risiko yang ditemukan yaitu :

- a. Membuat surat kepada petugas/personil KKP Kelas I Soekarno-Hatta dengan tembusan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap SARS-CoV 2/ Covid 19 bagi penumpang yang datang dari luar negeri.
- b. Melakukan pembinaan kepada klinik sekitar bandara Soekarno-Hatta (Klinik KKP, Klinik Bea Cukai, Klinik AP II, Klinik Hotel Bandara, Klinik PT JAS, Klinik GMF, dan Klinik PT ACS) dan di Bandara Halim Perdanakusuma (Klinik KKP, Klinik AP II dan Klinik PT JAS), untuk menyamakan persepsi dalam pembuatan pelaporan, baik laporan bulanan, laporan kejadian KLB maupun laporan kasus penyakit menular potensial PHEIC bila ditemukan.
- c. Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap penumpang kedatangan luar negeri.
- d. Membuat surat kepada lintas sektor, senior general manager PT Angkasa Pura II, dengan tembusan station manager airlines, AOC dan Groundhandling di Bandara Soekarno-Hatta tentang pemberian informasi mengenai gejala, cara penularan dan cara pencegahan SARS CoV 2 / Covid 19, serta bekerjasama dalam rangka peningkatan kewaspadaan kasus SARS CoV 2 dan apabila menemukan penumpang sakit dengan gejala demam, batuk, sesak nafas dan badan lemah agar segera melapor ke petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- e. Memasang Video spot dan E banner Kewaspadaan Kasus di Terminal 3 International Bandara Soekarno-Hatta.
- f. Melakukan desiminasi informasi *Weekly Epidemiologi Report (WER)* tentang perkembangan penyakit yang sedang *outbreaks* di dunia secara rutin setiap minggu kepada poliklinik KKP dan poliklinik non KKP di wilayah Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma.



- g. Menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk penanggulangan kasus PHEIC.
- h. Melakukan pertemuan rencana kontingensi untuk mereview hasil renkon dengan kegiatan penanganan COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta.
- i. Penyiapan alokasi anggaran dalam DIPA KKP Kelas I Soekarno Hatta.
- j. Penyediaan bahan dan peralatan yang memadai.
- k. Diseminasi hasil pengawasan kepada lintas sektor dan program terkait.
- l. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program di bandara, termasuk dalam pemberdayaan kader.
- m. Konsultasi teknis dan koordinasi dengan pusat dan lintas sektor.
- n. Bimbingan teknis ke wilayah kerja.
- o. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan fungsional entomologi kesehatan

7. Kendala / Permasalahan

- a. Kurangnya koordinasi dengan klinik di sekitar bandara dikarenakan terdapat petugas klinik dengan sistem kerja *Work From Home* (WFH) sehingga pelaporan menjadi terhambat.
- b. Informasi mengenai renkon yang masih terbatas di pimpinan. Sehingga saat terjadi kasus penyakit ataupun bencana petugas harus mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan kontingensi.
- c. Terdapat terminal penumpang yang dihentikan operasionalnya dikarenakan pandemi covid-19 sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan higiene sanitasi gedung dan bangunan di lokasi-lokasi tersebut.
- d. Sebagian besar rumah makan atau restoran berhenti beroperasi saat pandemi Covid-19.
- e. Tingkat kepadatan vektor tertentu di beberapa titik sempit tinggi sehingga diperlukan intervensi
- f. Terdapat kondisi lingkungan yang mendukung tempat perkembangbiakan vektor

8. Pemecahan Masalah

- a. Koordinasi kepada pihak klinik untuk tetap melakukan pelaporan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk melanjutkan kembali jejaring melalui online dengan petugas di lapangan baik KKP, groundhandling, klinik, maupun maskapai sehingga baik informasi, maupun pelaporan dapat dilakukan dan koordinasi dapat dilakukan lebih cepat.
- b. Melakukan upaya pengendalian di titik-titik dimana kepadatan vektornya tinggi hingga tingkat kepadatannya menjadi rendah sehingga tidak berpotensi menimbulkan penularan penyakit akibat vektor.
- c. Berkoordinasi dengan pihak pengelola bandara dan lintas sektor lainnya serta memberikan rekomendasi intervensi lingkungan yang diperlukan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a. Sistem pelaporan dan permohonan dokumen secara online melalui Whatsapp dan email ke klinik kesehatan di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.
- b. Memberdayakan kader dalam kegiatan di lapangan.
- c. Membangun sinergi dengan lintas sektor di bandara untuk saling memperkuat program dengan menggunakan masing-masing sumber daya yang ada di instansinya. Termasuk memonitor kegiatan Badan Usaha Swasta *Pest Control* yang beroperasi di bandara.
- d. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini yaitu Rp. 279.824.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 278.604.000 atau 99,6% dan dapat mencapai kinerja sebesar 109%, sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.



INDIKATOR 4 Nilai Kinerja Anggaran

1. Pengertian

Indikator nilai kinerja anggaran merupakan *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART DJA. Variabel yang diukur antara lain capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya nilai kinerja anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta sehingga menggambarkan pencapaian output fisik maupun anggaran yang baik.

2. Definisi Operasional

Nilai kinerja anggaran yang telah terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA.

3. Rumus/Cara Perhitungan

$$\text{Capaian indikator nilai kinerja anggaran} = \frac{\text{Nilai Kinerja Anggaran}}{\text{Target Nilai Kinerja}} \times 100\%$$

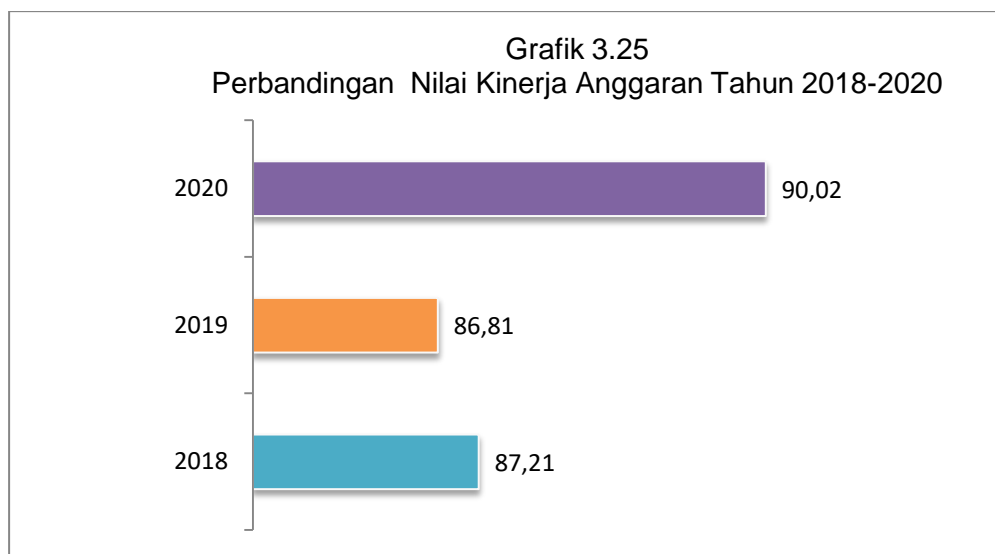
4. Capaian Indikator

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan



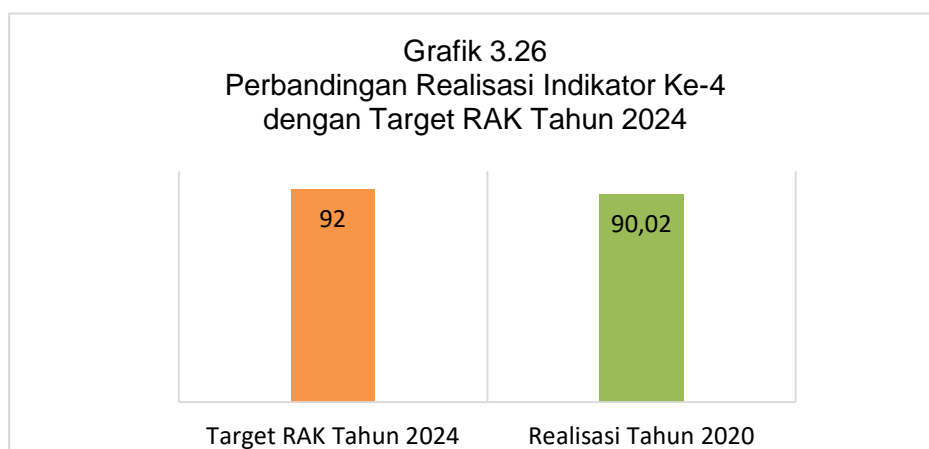
Nilai kinerja anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2020 yaitu 90,02 dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 80 sehingga capaian kinerja sebesar 112,5%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



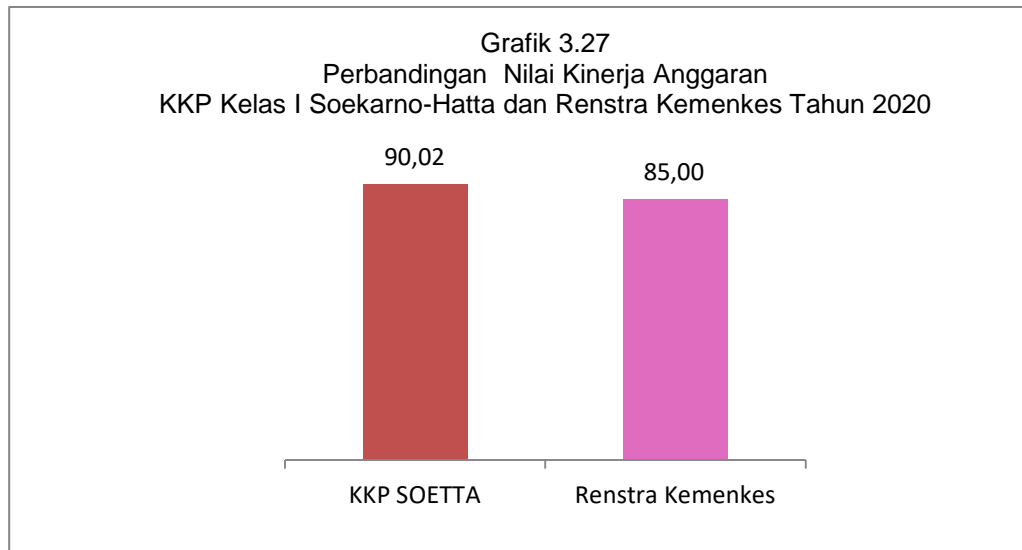
Pada grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 nilai kinerja anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Nilai kinerja anggaran pada tahun 2018 yaitu 87,21 dan pada tahun 2019 yaitu 86,81.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020-2024)



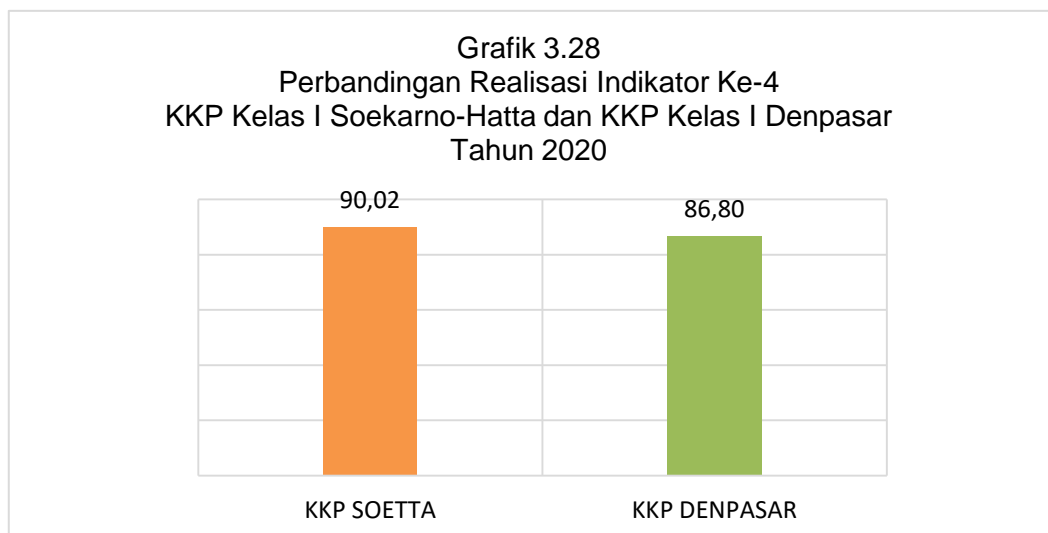
Realisasi indikator nilai kinerja anggaran pada tahun 2020 yaitu 90,02%, hal ini belum mencapai target RAK tahun 2024 yaitu 92.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai kinerja anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2020 sebesar 90,02 dan telah melebihi target nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan tahun 2020 yaitu 85.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Organisasi Sejenis/Setara



Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai kinerja anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta lebih tinggi dari KKP Kelas I Denpasar, dengan nilai kinerja anggaran masing-masing yaitu 90,02 dan 86,80.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator nilai kinerja anggaran telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya perencanaan tahunan berupa Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penarikan Kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara tepat disesuaikan dengan TOR dan RAB serta kebutuhan di lapangan sehingga volume layanan dapat tercapai.

6. Upaya/Kegiatan yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- a. Rekonsiliasi data realisasi anggaran antara subbagian pelaporan dengan subbagian keuangan setiap bulannya.
- b. Rekonsiliasi capaian volume keluaran dengan masing-masing bidang untuk pengisian realisasi volume layanan yang telah tercapai.
- c. Pengisian aplikasi e-monev SMART DJA setiap bulan.
- d. Melakukan konsultasi ke Bagian Program Informasi Ditjen P2P terkait kendala teknis pengisian aplikasi e-monev SMART DJA.

7. Kendala / Permasalahan

- a. Rentan terdapat anomali data jika terjadi kesalahan perhitungan progress RVK (Realisasi Volume Kegiatan)
- b. Terdapat indikator yang dapat dihitung dalam periode satu tahun dengan target satu layanan, sehingga capaian indikator tidak dapat menggambarkan secara bulanan.

8. Pemecahan Masalah

- a. Melakukan monitoring progress dan capaian RVK rutin setiap bulan
- b. Mengisi progress capaian keluaran setiap bulannya, sehingga walaupun volume layanan belum tercapai namun tetap ada keterangan progress kegiatan.



9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pusat menggunakan aplikasi rapat daring sehingga dapat mengurangi anggaran perjalanan dinas.
- b. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini yaitu Rp. 29.821.854.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.173.044.703 atau 91,1% dan dapat mencapai kinerja sebesar 112,5%, sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.



INDIKATOR 5

Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan

1. Pengertian

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Indikator tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan menggambarkan kepatuhan satker dalam menyampaikan laporannya. Outcome dalam indikator ini yaitu meningkatnya laporan keuangan satker yang akuntabel.

2. Definisi Operasional

Parameter rekonsiliasi Laporan Keuangan bulanan terdiri dari ketepatan waktu upload, status rekonsiliasi, hasil rekonsiliasi, perbedaan rekonsiliasi internal SAK dengan SIMAK BMN, dan jumlah upload.

3. Rumus/Cara Perhitungan

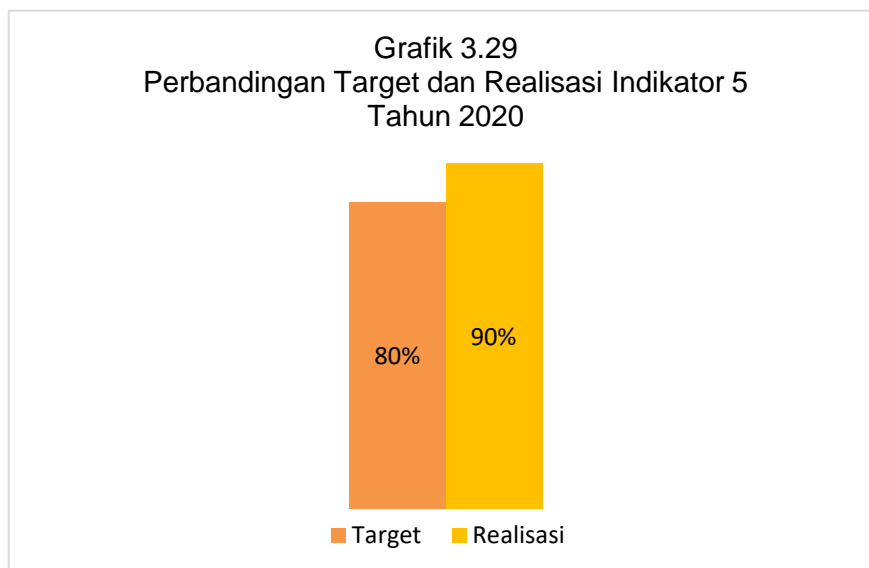
$$\text{Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan} = \frac{\text{Jumlah total skor setiap parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 100\%$$

4. Capaian Indikator

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan
Pemenuhan parameter rekonsiliasi Laporan Keuangan pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

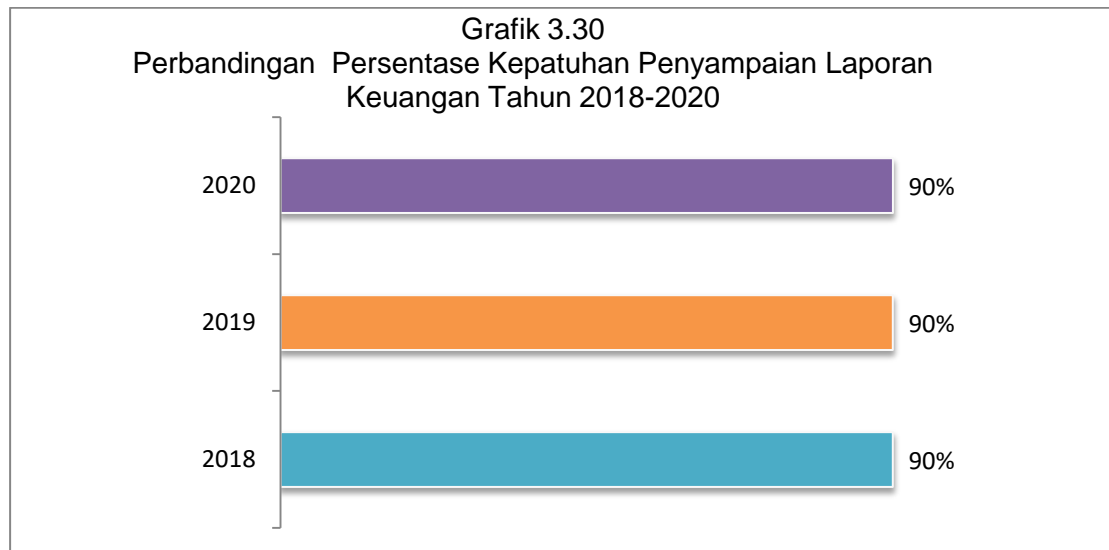
No	Parameter	Hasil	Skoring
1.	Ketepatan waktu upload	12 Januari 2021	100
2.	Status rekonsiliasi	BAR siap download	100
3.	Hasil rekonsiliasi	Sama	100
4.	Perbedaan rekonsiliasi internal SAK dang SIMAK BMN	Tidak ada perbedaan	100
5.	Jumlah upload	11 kali upload	50
Total Skor			90





Berdasarkan pemenuhan parameter rekonsiliasi Laporan Keuangan diatas, maka persentase tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan tahun 2020 sebesar 90% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 80%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 112,5%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

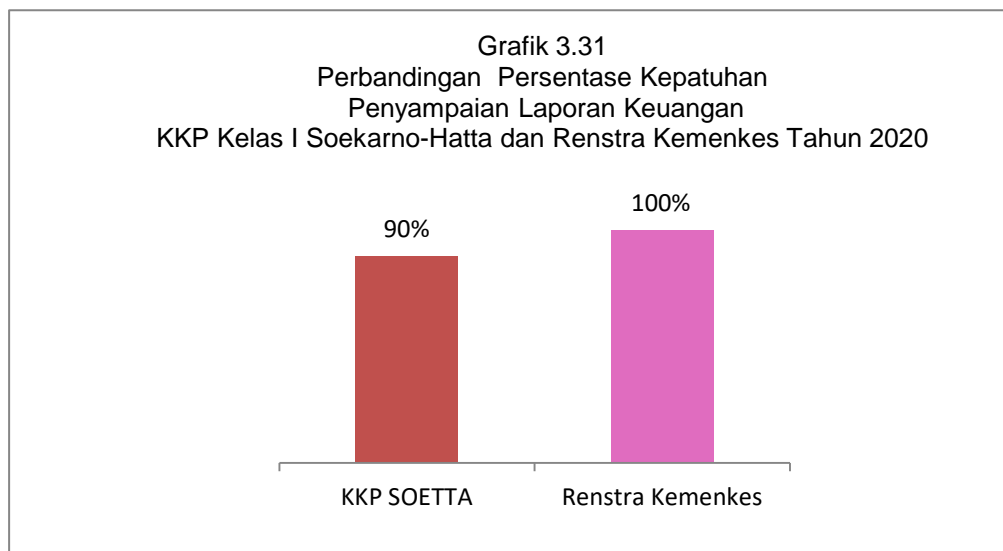


Pada grafik diatas diketahui bahwa pada persentase kepatuhan penyampaian laporan keuangan pada tahun 2020 sama dengan tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 90%. Hal ini dikarenakan jumlah upload ke aplikasi melebihi 5 (lima) kali.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020-2024)

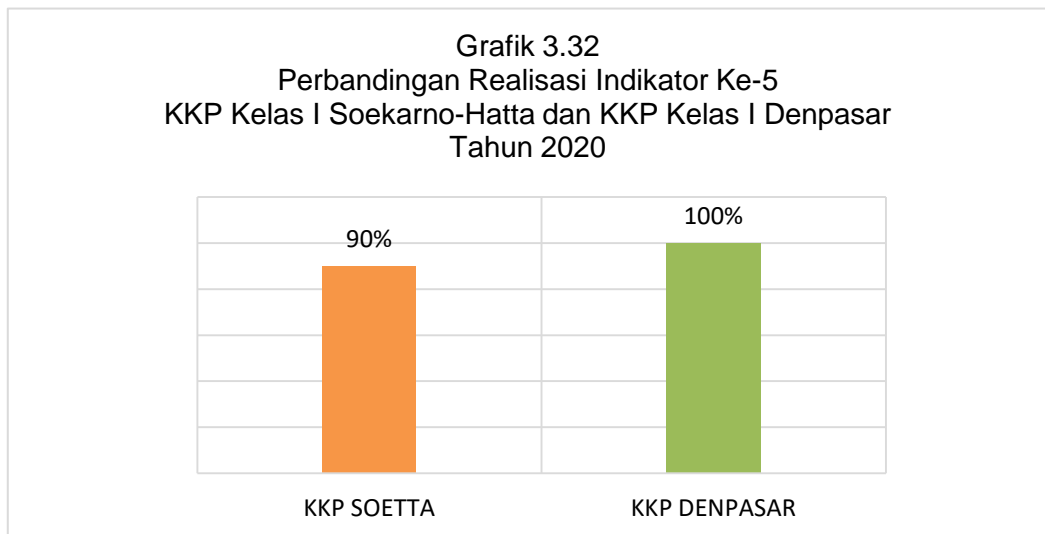
Indikator tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan tidak dapat dibandingkan dengan target RAK tahun 2024 karena pada tahun 2021 hingga tahun 2024 indikator ini diganti dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase kepatuhan penyampaian laporan keuangan KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2020 yaitu 90% dan belum mencapai target indikator tersebut pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 yaitu 100%.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Organisasi Sejenis/Setara



Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan KKP Kelas I Soekarno-Hatta lebih rendah dari KKP Kelas I Denpasar, dengan persentase masing-masing yaitu 90% dan 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator persentase tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan telah melebihi target yang ditetapkan, didukung oleh adanya petugas terlatih dalam pengelolaan keuangan dan BMN, terdapat aplikasi SAIBA, SIMAK-BMN, SAS yang disediakan oleh Kementerian Keuangan yang didukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti komputer, laptop, dan jaringan internet. serta d rekonsiliasi internal antara rtugas SAIBA dan SIMAK-BMN.

6. Upaya/Kegiatan yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- a. Penyusunan realisasi anggaran bulanan/triwulan/semester/tahunan
- b. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan satker
- c. Melakukan rekonsiliasi internal antara petugas SAIBA dan SIMAK-BMN
Melakukan updata data SAS ke aplikasi SAIBA
- d. Peningkatan kapasitas petugas penyusun Laporan Keuangan

7. Kendala / Permasalahan

Terjadi gangguan / error pada aplikasi SAS, SAIBA, dan SIMAK sehingga tidak dapat melakukan rekonsiliasi dengan KPPN

8. Pemecahan Masalah

Melakukan konsultasi teknis dengan Ditjen P2P dan KPPN terkait gangguan aplikasi.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a. Pelaksanaan rekonsiliasi secara daring sehingga dapat mengurangi anggaran perjalanan dinas.
- b. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini yaitu Rp. 63.814.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.810.000 atau 92,2% dan dapat mencapai kinerja sebesar 112,5%, sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.



INDIKATOR 6

Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker

1. Pengertian

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Implementasi WBK berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Outcome dalam indikator ini yaitu meningkatnya kualitas satker dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Definisi Operasional

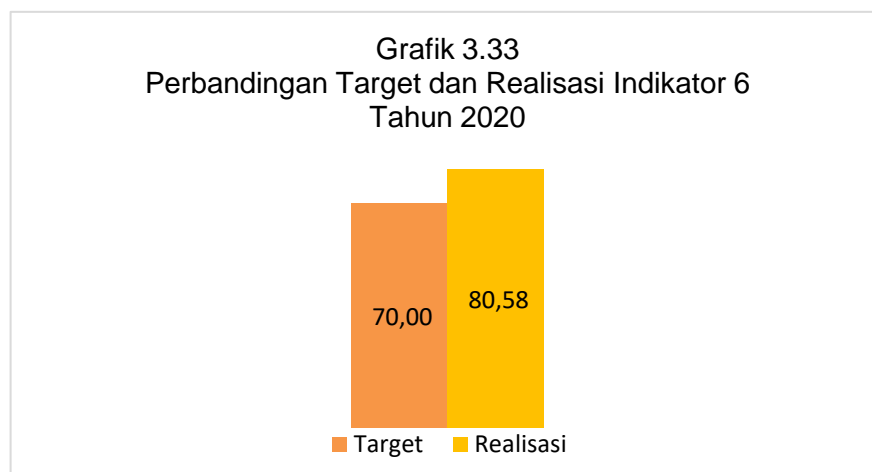
Nilai evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil indikator WBK

3. Rumus/Cara Perhitungan

$$\text{Capaian Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker} = \frac{\text{Nilai Hasil Pre Assessment}}{\text{Target Nilai}} \times 100\%$$

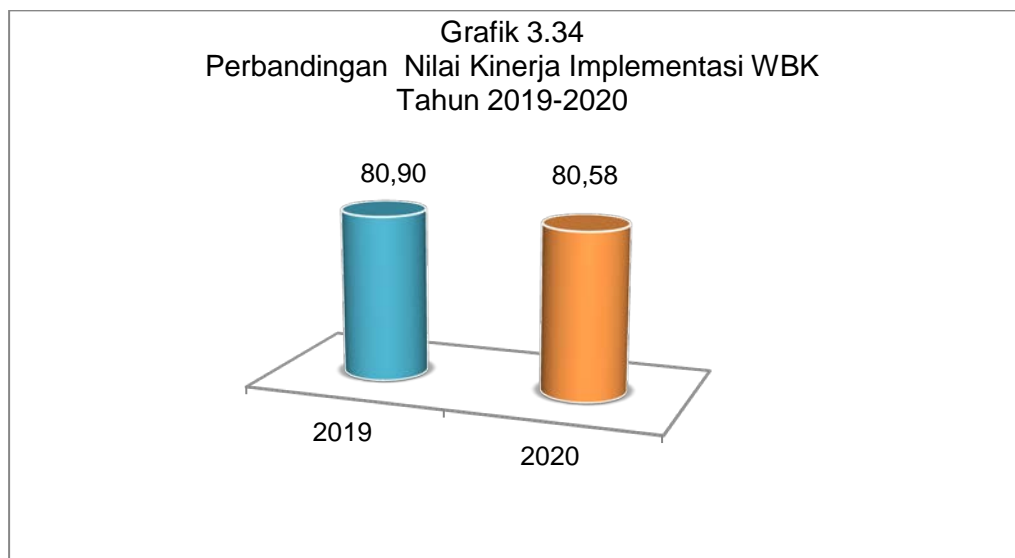
4. Capaian Indikator

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan



Berdasarkan hasil pre assessment implementasi WBK yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, diperoleh nilai sebesar 80,58 dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 70, sehingga capaian kinerjanya sebesar 115,1%.

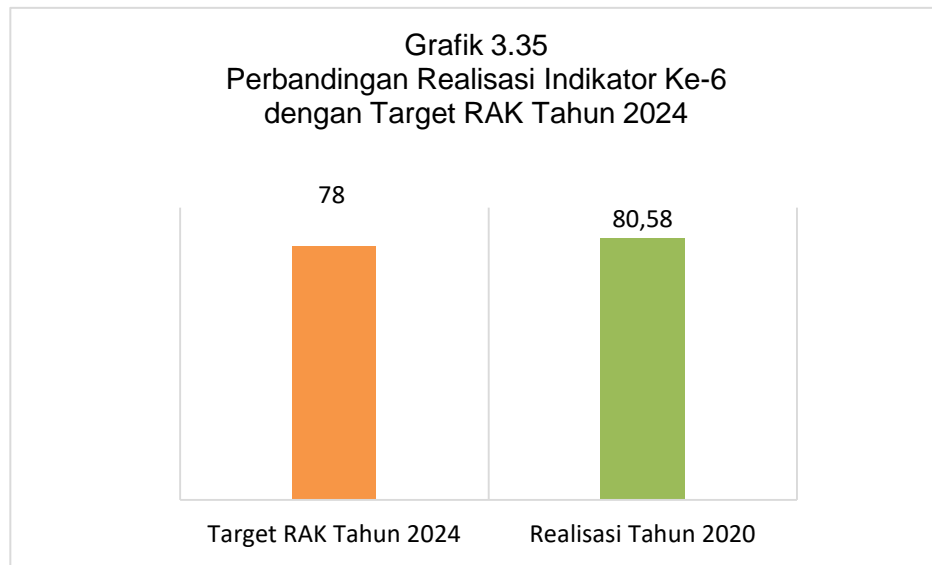
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Pada grafik diatas diketahui bahwa nilai yang diperoleh pada tahun 2020 lebih rendah sedikit daripada tahun 2019. Nilai pada tahun 2019 yaitu 80,90 sedangkan nilai pada tahun 2020 yaitu 80,58. Pada tahun 2019, KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah mendapatkan predikat sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Indikator WBK dari Menteri Kesehatan

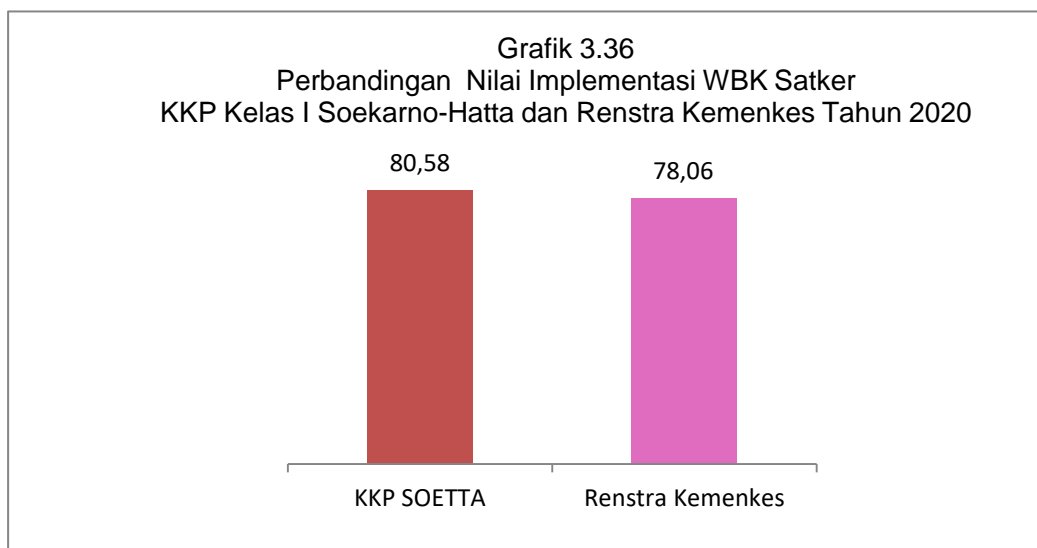


c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020-2024)



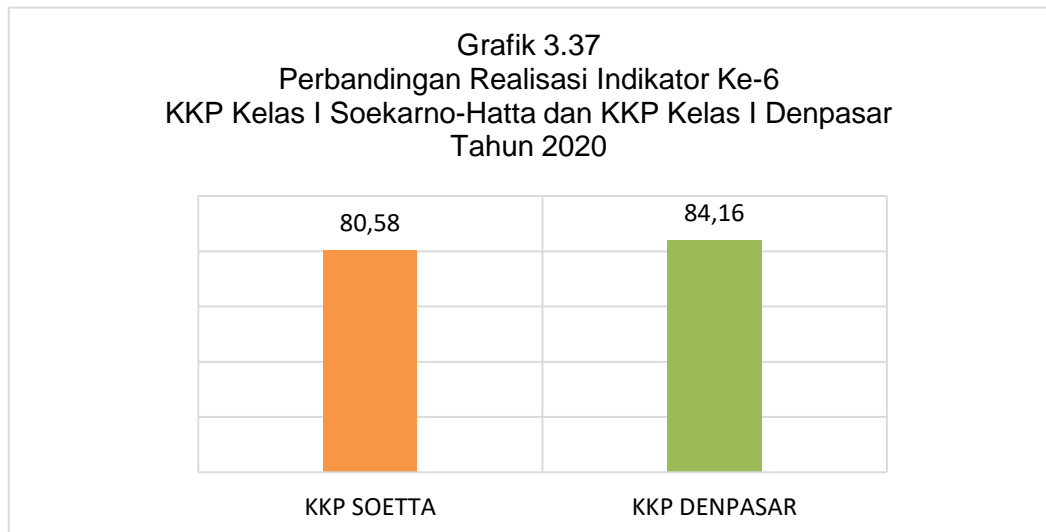
Realisasi indikator nilai kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2020 yaitu 80,58 dan telah melebihi target RAK tahun 2024 yaitu 78.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai implementasi WBK Satker KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2020 yaitu 80,58 dan telah melebihi target nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 yaitu 78,06. Sehingga hal ini dapat mendukung pencapaian target indikator persentase satker KP/KD yang telah memenuhi perdikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional) sebesar 40%.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Organisasi Sejenis/Setara



Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai implementasi WBK Satker KKP Kelas I Soekarno-Hatta lebih rendah dari KKP Kelas I Denpasar, dengan persentase masing-masing yaitu 80,58 dan 84,16.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator nilai kinerja implementasi WBK KKP Kelas I Soekarno-Hatta dapat mencapai target, hal ini karena terdapat komitmen dari pimpinan untuk mengimplementasikan WBK, dibentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari enam Kelompok Kerja yang ditetapkan dalam SK Kepala Kantor. Selain itu, proses pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh pegawai dan rutin dilakukan sosialisasi WBK.

6. Upaya/Kegiatan yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- a. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
- b. Menlaksanakan rencana kegiatan berdasarkan jadwal kegiatan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi WBK secara berkala
- d. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P dan Itjen terkait pelaksanaan pre assessment.

7. Kendala / Permasalahan

- a. Terdapat banyak anggota Tim Pembangunan Zona Integritas yang terlibat aktif di lapangan dalam penanganan COVID-19 sehingga kegiatan WBK tidak terlaksana sesuai jadwal.
- b. Belum semua pegawai terlibat aktif dalam beberapa kegiatan WBK.
- c. Terdapat rekomendasi-rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

8. Pemecahan Masalah

- a. Melaksanakan kegiatan WBK dengan memaksimalkan SDM yang ada dan beberapa kegiatan dilakukan secara daring.
- b. Mendorong pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta untuk menyampaikan SIHARKA, LHKASN, dan laporan gratifikasi.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini yaitu Rp. 121.644.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 110.989.000 atau 91,2% dan dapat mencapai kinerja sebesar 115,1%, sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.



INDIKATOR 7

Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

1. Pengertian

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1(satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas. Outcome indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas ASN KKP Kelas I Soekarno-Hatta untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

2. Definisi Operasional

ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rumus/Cara Perhitungan

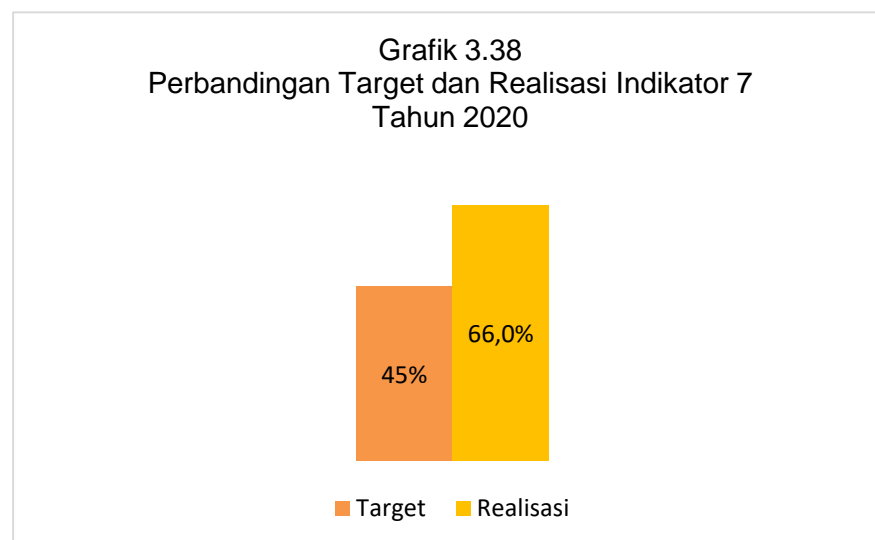
$$\text{Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL} = \frac{\text{Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100\%$$

4. Capaian Indikator

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Pada tahun 2020 terdapat 95 orang ASN atau sebanyak 66,0% dari jumlah pegawai yaitu 144 orang yang telah mengikuti peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. Jenis peningkatan kapasitas SDM yang diikuti diantaranya:

No	Jenis Peningkatan Kapasitas	Jumlah
1	Pendidikan	
	- Tugas Belajar	1 orang
	- Ijin Belajar	8 orang
2	Pelatihan Klasikal	
	- Pelatihan teknis	18 orang
	- Seminar/Konferensi	85 orang
	- Workshop	2 orang
	- Sosialisasi	5 orang
3	Pelatihan Non klasikal	
	E-learning	1 orang



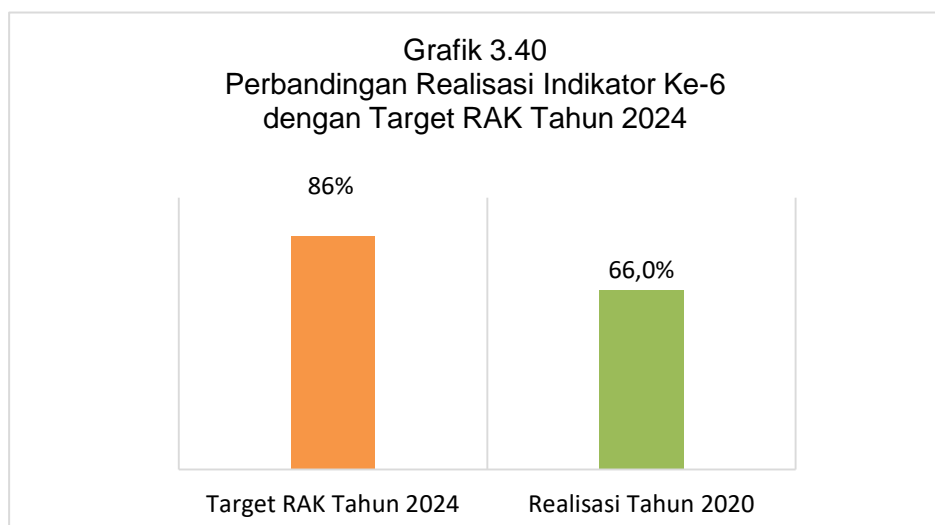
Dari grafik diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2020 yaitu 66,0% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 45%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 146,7%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya



Pada tahun 2018 dan 2019 indikator yang digunakan yaitu jumlah peningkatan kapasitas SDM sehingga tidak dapat diketahui jumlah ASN yang telah mengikuti peningkatan SDM sebanyak 20 JPL. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pada tahun 2018 dan 2019 adalah jumlah yang berulang dimana satu orang ASN dapat mengikuti beberapa pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 12 pelatihan, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 9 pelatihan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RAK Tahun 2020-2024)

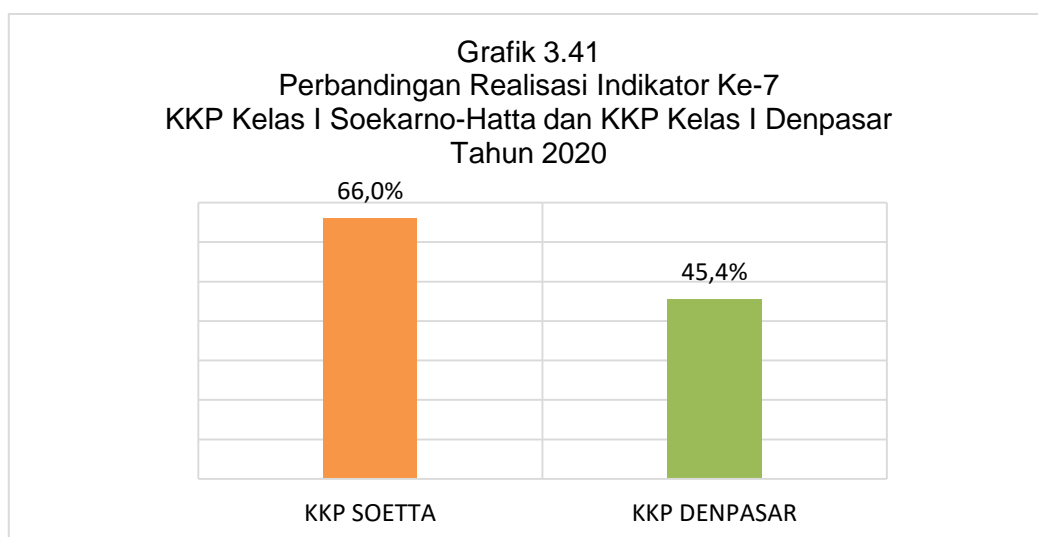


Realisasi indikator jumlah ASN yang mengikuti kapasitas sebanyak 20 JPL pada tahun 2020 yaitu 66% dan telah melebihi target RAK tahun 2024 yaitu 86%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Di dalam Renstra Kemenkes terdapat indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 41.669 orang pada tahun 2020, sehingga capaian indikator jumlah ASN yang mengikuti kapasitas sebanyak 20 JPL sebesar 66% dapat mendukung pencapaian indikator Renstra tersebut.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Organisasi Sejenis/Setara



Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL KKP Kelas I Soekarno-Hatta lebih tinggi dari KKP Kelas I Denpasar, dengan persentase masing-masing yaitu 66,0% dan 45,4%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator persentase jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL telah mencapai target yang ditetapkan karena adanya motivasi dari pimpinan kepada seluruh ASN untuk peningkatan kapasitas ASN dan partisipasi ASN untuk mengikuti berbagai jenis peningkatan kapasitas ASN, baik dengan anggaran yang bersumber dari APBN maupun

pribadi. Selama masa pandemi COVID-19, tersedia banyak webinar yang tidak berbayar sehingga dapat memudahkan pegawai untuk mengikutinya.

6. Upaya/Kegiatan yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

- a. Perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN
- b. Melakukan monitoring rutin peningkatan kapasitas ASN
- c. Memotivasi pegawai yang belum memenuhi peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL.

7. Kendala / Permasalahan

- a. Banyaknya jadwal pelatihan offline yang sudah direncanakan, namun tidak terlaksana karena pihak penyelenggara mematakannya.
- b. Pelatihan teknis dengan praktik langsung untuk meningkatkan keterampilan pegawai tidak banyak, dikarenakan pelatihan mayoritas bersifat daring.

8. Pemecahan Masalah

- a. Berkoordinasi dengan Badan Pelatihan Kesehatan atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- b. Menyusun rencana dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan teknis di tahun mendatang.

9. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- a. Peningkatan kapasitas ASN tidak hanya bersumber dari DIPA KKP Kelas I Soekarno-Hatta, seperti izin belajar dan pemanfaatan webinar yang tidak berbayar.
- b. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini yaitu Rp. 1.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.460.000 atau 100% dan dapat mencapai kinerja sebesar 146,7%, sehingga telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator tersebut.

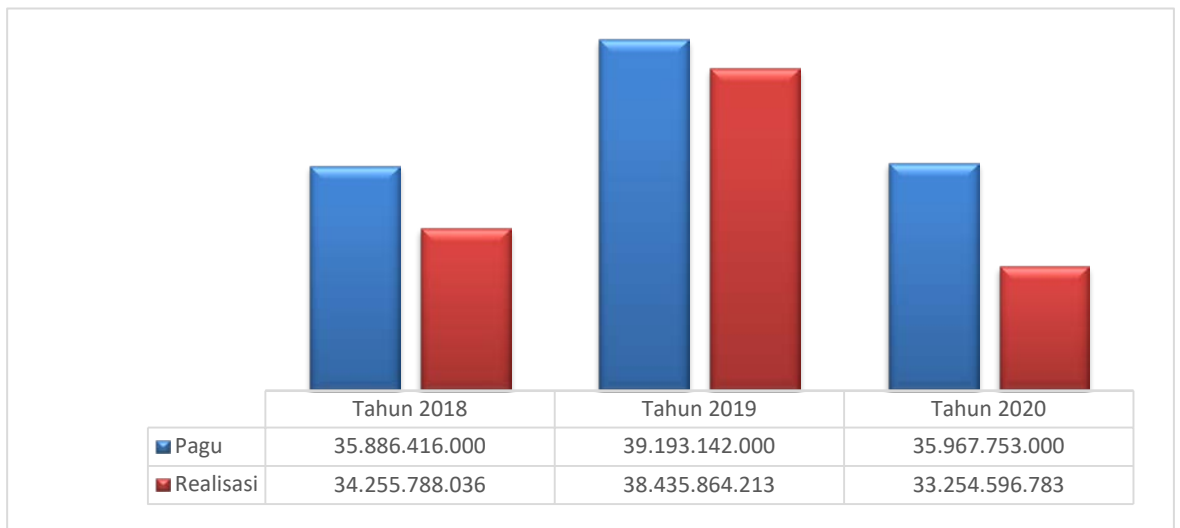


B. REALISASI ANGGARAN

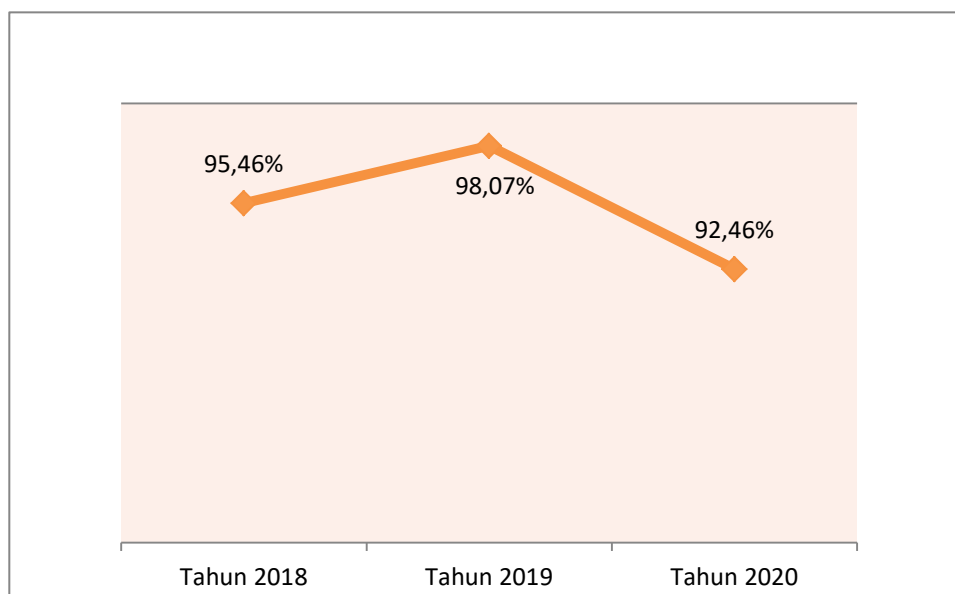
1. Anggaran Pengeluaran

Pagu awal KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada DIPA Tahun 2020 sebesar Rp. 36.806.623.000,- dan pada akhir tahun anggaran menjadi Rp. 35.967,753.000,- dengan realisasi sebesar 33.254.596.783,- atau sebesar 92,46%.

Grafik 3.42
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020
KKP Kelas I Soekarno Hatta



Grafik 3.43
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020
KKP Kelas I Soekarno Hatta



Dari grafik 3.48 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat kenaikan anggaran pada tahun 2019 dan penurunan kembali pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 tidak terdapat belanja modal seperti pada tahun 2019. Begitupun dengan realisasi pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan:

- Pembayaran gaji CPNS yang sudah dianggarkan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta, masih dibayarkan oleh Biro Umum Kemenkes
- Tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14 sudah dianggarkan, namun tidak dapat direalisasikan karena adanya kebijakan terkait pandemi COVID-19.

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Pengeluaran Menurut Jenis Belanja
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	20.052.089.000	17.539.851.570	87,47%
2	Belanja Barang	15.915.664.000	15.714.645.213	98,74%
	Total	35.967.753.000	33.254.596.783	92,46%

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020

No	Sumber Pembiayaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni (RM)	31.219.071.000	28.546.511.333	91,44%
2	PNBP	4.748.682.000	4.708.085.450	99,51%
	Total	35.967.753.000	33.254.596.783	92,46%

Pagu anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta berasal dari 2 sumber pembiayaan yaitu Rupiah Murni dan PNBP. Sumber Rupiah Murni sebesar Rp. 31.219.071.000,- atau 86,8% dari pagu total dengan realisasi anggaran sebesar 91,44% sedangkan yang berasal dari PNBP yaitu Rp. 4.748.682.000,- atau 13,2% dari pagu total dengan realisasi sebesar 99,51%.

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Output KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020

KODE	KEGIATAN / OUTPUT	PAGU	VOL	REALISASI			
				ANGGARAN	%	VOL	%
2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	30,007,312,000		27,342,844,603	91,12		
2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,541,590,000	1 layanan	1,508,179,164	97,83	1 layanan	100
2063.994	Layanan Perkantoran	28,465,722,000	1 layanan	25,834,665,439	90,76	1 layanan	100
4249	Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	5,960,441,000		5,911,752,180	99,18		
4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	5,960,441,000	2.636 layanan	5,911,752,180	99,18	2.636 layanan	100
TOTAL		35.967.753.000	2.2638 layanan	33.254.596.783	92,46	2.2638 layanan	100

Sebagian besar anggaran KKP Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2020 dipergunakan untuk Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 92,46% dengan capaian target layanan sebesar 100,0%.

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan		4.497.936.000	4.487.669.200	99,8%
		Layanan kekarantinaan kesehatan khusus bandar udara Soekarno-Hatta Terminal Internasional	4.100.100.000	4.091.892.100	
		Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS	6.125.000	6.125.000	
		Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP	17.160.000	17.160.000	
		Pelayanan kesehatan	318.866.000	317.207.100	
		Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan COP	24.000.000	23.600.000	
		Layanan pemeriksaan P3K pesawat			
		Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat dalam rangka sertifikasi	14.500.000	14.500.000	
		Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC	925.000	925.000	
		Pengawasan faktor risiko terhadap OMKABA melalui pintu masuk internasional	10.800.000	10.800.000	
		Penyehatan lingkungan	5.460.000	5.460.000	
2	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan		1.181.221.000	1.144.018.980	96,9%
		Layanan kegawatdaruratan dan rujukan kategori 1	204.120.000	204.120.000	
		Layanan kesehatan pada situasi khusus lainnya	317.681.000	281.292.250	
		Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan KLB			
		Koordinasi dalam rangka pengawasan dokumen kekarantinaan dengan wilayah			

		Pencegahan dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan	168.640.000	167.986.000	
		Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut			
		Kegiatan desinfeksi alat angkut dan lingkungan di wilayah bandara dalam rangka Covid-19	133.200.000	133.130.000	
		Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	197.880.000	197.792.730	
		Desinfeksi	152.860.000	152.858.000	
		rapat koordinasi pemantauan kualitas lingkungan	6.840.000	6.840.000	
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara		279.824.000	278.604.000	99,6%
		Surveilans Epidemiologi	82.400.000	82.400.000	
		Penyelidikan epidemiologi	34.540.000	34.420.000	
		Penyusunan dokumen renkon	9.000.000	9.000.000	
		Layanan survei vektor pes	38.595.000	38.595.000	
		Layanan survei vektor DBD	38.400.000	38.400.000	
		Layanan pengendalian vektor DBD	26.520.000	25.420.000	
		Layanan survei vektor diare	12.800.000	12.800.000	
		Layanan pengendalian vektor diare	6.495.000	6.495.000	
		Pengawasan hygiene sanitasi hotel	4.500.000	4.500.000	
		Pengawasan hygiene sanitasi TPM	24.774.000	24.774.000	
		Pengawasan kualitas air minum untuk kebutuhan alat angkut, penumpang, dan pekerja di bandara	1.800.000	1.800.000	
4	Nilai kinerja anggaran		29.821.854.000	27.173.044.703	91,1%
		Penyusunan rencana program dan rencana anggaran	12.280.000	11.780.000	
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	355.794.000	339.679.264	
		Layanan Perkantoran	28.465.722.000	25.834.665.439	

		Pengelolaan kepegawaian	988.058.000	986.920.000	
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan		63.814.000	58.810.000	92,2%
		Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	63.814.000	58.810.000	
6	Kinerja implementasi WBK satker		121.644.000	110.989.900	91,2%
		Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan	121.644.000	110.989.900	
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL		1.460.000	1.460.000	100,0%
		Peningkatan kualitas SDM	1.460.000	1.460.000	
TOTAL			35.967.753.000	33.254.596.783	92,46%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber anggaran penerimaan KKP Kelas I Soekarno-Hatta antara lain berasal dari: buku ICV, vaksinasi, penerbitan dokumen, pemeriksaan pasien, pelayanan ambulans dan penerbitan sertifikat. Pada tahun 2020, KKP Kelas I Soekarno-Hatta menargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp. 5.522.920.000,-.

Tabel 3.9
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2020

No	Jenis PNBP	Tarif	Realisasi PNBP	
			Tahun 2020	
			Volume	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan			
	Buku ICV	25000	43988	1.099.700.000
	Vaksin yellow Fever	300000	1046	313.800.000
	Vaksin Meningitis	260000	15706	4.083.560.000
2	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan		0	-
	Jasa Pemberian Surat Keterangan Medical Contraindication of Vaccination	5000	7	35.000
	Pemeriksaan dokter	20000	19509	390.180.000
	Ambulance ke DKI (dlm kota)	50000	197	9.850.000
	Ambulance luar DKI (Jakarta, Bekasi, Bogor)	100000	0	-
	Ambulance Jarak tempuh 10 km	50000	0	-
	Tambahan per km (setelah 10 km)	5000	1336	6.680.000
	Sertifikat Knock Down	100000	0	-

Sertifikat OMKA	100000	22	2.200.000
Sertifikat Air Bersih	50000	335	16.750.000
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran	50000	0	-
Sertifikat laik hygiene sanitasi restoran (HB)	100000	16	1.600.000
Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga Gol C	100000	0	-
Sertifikat Sanitasi Pesawat	25000	20	500.000
Sertifikat Desinfeksi	100000	43	4.300.000
Ijin Penyelenggaraan Tindakan Penyehatan dan Angkut	1000000	1	1.000.000
Sub Total PNPB Fungsional			5.930.155.000
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun yg lalu			17.611.789
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yg lalu			88.690.164
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			68.011.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu (Tindak Lanjut Itjen)			1.670.000
Jumlah			6.106.137.953

Realisasi penerimaan negara bukan pajak fungsional tahun 2020 sebesar Rp. 5.930.155.000,- ditambahkan dengan penerimaan negara bukan pajak umum sebesar Rp. 175.982.953,- sehingga penerimaan negara bukan pajak keseluruhan sebesar Rp 6.106.137.953,- atau 110,55% dari target.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Per Indikator

Efisiensi sumber daya dihitung dari capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran. Efisiensi dari setiap indikator sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Indikator

No	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	197,2%	99,8%	97,4%
2	Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan	111,1%	96,9%	14,20%

3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara	109%	99,6%	9,4%
4	Nilai kinerja anggaran	112,5%	91,1%	21,40%
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	112,5%	92,2%	32,80%
6	Kinerja implementasi WBK satker	115,1%	91,2%	23,90%
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	146,7%	100,0%	46,70%

Dari 7 indikator diatas, dapat terlihat sebagai berikut:

- Efisiensi tertinggi pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan, dimana dengan realisasi anggaran 99,8% telah mencapai kinerja sebesar 197,2% sehingga efisiensinya sebesar 97,4%
- Efisiensi terendah pada indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, dimana dengan realisasi anggaran sebesar 99,6% dapat mencapai kinerja sebesar 109% sehingga efisiensinya sebesar 9,4%.

b. Efisiensi Per Output

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran

CKi : Capaian Keluaran

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Dari hasil perhitungan pagu anggaran keluaran, realisasi anggaran keluaran dan capaian keluaran sesuai dengan e monev DJA tahun 2020 maka diperoleh hasil sesuai dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Output

No	Nama Output	Pagu	Anggaran	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,541,590,000	1,508,179,164	100%	0,02	55,4%
2	Layanan Perkantoran	28,465,722,000	25,834,665,439	100%	0,09	73,1%
3	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	5,960,441,000	5,911,752,180	100%	0,008	52,0%

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- Efisiensi tertinggi pada output layanan perkantoran dengan nilai efisiensi sebesar 73,1%.
- Efisiensi terendah pada output layanan pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu masuk dengan nilai efisiensi sebesar 52%.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan berjalan lebih efisien diantaranya:

- Melakukan pemantauan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan yang melibatkan struktural dari masing-masing bidang/bagian.
- Melakukan monev terpadu ke Wilker Halim Perdanakusuma.
- Memanfaatkan teknologi informasi salah satunya aplikasi rapat daring dalam setiap pertemuan dan desk kegiatan.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada tahun 2020 telah meningkatkan kinerja dalam cegah tangkal keluar masuknya penyakit menular berpotensi wabah baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma dalam rangka mendukung upaya meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan.

Pada tahun 2020 KKP Kelas I Soekarno-Hatta telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, seluruh indikator telah tercapai diatas 100% dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 132,5% dengan realisasi anggaran sebesar 92,46%.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja di tahun 2020 yaitu adanya kebijakan dan strategi dalam pencegahan keluar masuknya penyakit baik nasional, daerah, maupun di tingkat satuan kerja yang didukung oleh optimalisasi penggunaan sumber daya baik SDM maupun sarana prasarana lainnya, tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta peningkatan kerjasama tim dan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 antara lain keterbatasan sumber daya di lapangan, adanya perubahan kebijakan yang cepat berubah selama pandemi Covid-19, dukungan teknologi informasi yang belum optimal, dan sinergi lintas sektor yang perlu ditingkatkan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut perbaikan pada tahun yang akan datang diantaranya usulan penambahan SDM, peningkatan kapasitas SDM, monitoring dan evaluasi rutin pencapaian kegiatan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik melalui advokasi, sosialisasi kegiatan dan membangun komitmen secara bersama-sama untuk mencegah keluar masuknya penyakit melalui pintu masuk Negara.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Darmawali Handoko, M.Epid
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp **35.967.753.000** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, Desember 2020

Pihak Kedua,

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

Pihak Pertama,

dr. Darmawali Handoko, M. Epid
NIP 196911252002121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	8.127.205
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%
		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	5.960.441.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	30.007.312.000
TOTAL		Rp.	35.967.753.000

Tangerang, Desember 2020

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta



dr. Darmawati Handoko, M. Epid
NIP 196911252002121003